KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAN

PEMERINTAH KOTA PAREPARE

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI

DI KOTA PAREPARE

NOMOR : HK.201/11/18/BPSDMP/2026

NOMOR : 100.3.7.1/36/Pem-KB/VIII/2026

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (29-08-2026), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. SUHARTO : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. TASMING HAMID : Wali Kota Parepare, berkedudukan di Parepare Jalan Jenderal Sudirman Nomor 78, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.1.3-1719 Tahun 2025, tanggal 14 Februari 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Daerah ...

Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Darah Kota Parepare, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah lembaga pemerintah penyelenggara pelayanan publik dan penyelenggara urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini tunduk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
   a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
   b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
   c. Undang-Undang Nomor 139 Tahun 2024 tentang Kota Parepare di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7076);

d. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836);
h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
k. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

l. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor 203 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan sinergi dan koordinasi pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi di Kota Parepare.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:

a. meningkatkan fungsi kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Kota Parepare;

b. menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan PARA PIHAK secara sinergi dan saling mendukung; dan

c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Parepare.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi di Kota Parepare.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

c. pemenuhan ...

c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknis transportasi yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan Analisa Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK);

d. pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kelancaran dan keselamatan transportasi di wilayah PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU;

e. penyerapan lulusan program Pendidikan Vokasi yang berasal dari putra dan putri daerah dengan masa wajib kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

f. kerja sama bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(3) PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menunjuk dan/atau menugaskan kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja/Pejabat terkait sesuai tugas pokok dan fungsi, serta perihal yang dikerjasamakan.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menyediakan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;

b. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengutamakan kelancaran tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan

d. menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan tidak akan menyebarkan hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 6 ...

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani.

(2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk memperpanjang Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengubah atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal rencana perubahan atau pengakhiran Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK atau sesuai kebutuhan.

(2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

(2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Kementerian Perhubungan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3456585

Email : sekretariat-bpsdmp@kemenhub.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

II. PIHAK KEDUA : Pemerintah Kota Parepare
Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Parepare
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 78, Kota Parepare
Telepon : (0421) 21157
Email : setdako@pareparekota.go.id

(3) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat Pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara PARA PIHAK.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa *(force majeure),* dapat dilakukan perubahan Kesepakatan Bersama ini atas persetujuan PARA PIHAK

(2) Yang dimaksud keadaan memaksa *(force majeure)* ialah keadaan atau peristiwa yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan siapapun juga yang mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, diantaranya: bencana alam, perang dan pemberontakan/kerusuhan, serta keadaan/peristiwa lain yang memenuhi batasan keadaan memaksa.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 12 ...

Pasal 12

ADDENDUM/PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau terjadinya perubahan *(addendum)* dalam Kesepakatan Bersama ini, akan ditentukan kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
TASMING HAMID	SUHARTO

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

TENTANG

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI

DI KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : HK.201/10/25/BPSDMP/2026

NOMOR : 100.3.7/55/01.01/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-07-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. SUHARTO, selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. GRENGSENG PAMUJI, selaku Bupati Magelang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang, yang beralamat di Kota Mungkid, Jalan Soekarno–Hatta Nomor 59 Kabupaten Magelang, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa PIHAK KESATU adalah institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;

b. bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Magelang; dan

c. bahwa memperhatikan proyeksi kebutuhan pegawai untuk jangka waktu 5 (lima) tahun jabatan yang akan diisi, Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) jabatan yang akan diusulkan dan telah di tandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Magelang, diperlukan kerja sama pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi di Kabupaten Magelang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836);

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan yang disepakati di dalam Kesepakatan Bersama ini.

(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan:

a. Meningkatkan fungsi kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Kabupaten Magelang;

b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan PARA PIHAK secara sinergi dan saling mendukung; dan

c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Magelang.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

(1) Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi di Kabupaten Magelang.

(2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU;

c. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknis transportasi yang dikembangkan oleh PIHAK KESATU sesuai dengan kebutuhan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) PIHAK KEDUA;

d. Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kelancaran dan keselamatan transportasi di wilayah PIHAK KEDUA oleh PIHAK KESATU; dan

e. Kerja sama bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan PARA PIHAK.

PASAL 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan PARA PIHAK;

b. memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. mengutamakan kelancaran tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

d. menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK bersifat rahasia.

PASAL 5

PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur hak dan kewajiban bagi PARA PIHAK.

(2) Dalam hal menindaklanjuti Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK dapat menunjuk atau memberikan kuasa kepada pejabat terkait untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama.

(3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan.

(4) PARA PIHAK dapat mengusulkan, menetapkan serta melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

(5) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dan dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*).

PASAL 6

PEMBIAYAAN

(1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Mekanisme, besaran, dan tanggung jawab pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama.

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

PASAL 7

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak memungkinkan dilaksanakan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 8

MONITORING DAN EVALUASI

(1) Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun oleh PARA PIHAK atau sesuai kebutuhan.

(2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan untuk menentukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

(2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

Paraf PIHAK KEDUA	Paraf PIHAK KESATU

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU

Bagian Hukum, Humas, dan Umum Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan, Kementerian Perhubungan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat

Telepon : (021) 3456585

Email : sekretariat-bpsdmp@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Magelang

up. Bagian Pemerintahan

Alamat : Jalan Soekarno-Hatta Nomor 59, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang

Telepon : (0293) 788181

Email : pemda@magelangkab.go.id

(3) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat Pasal ini, maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PIHAK lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

PASAL 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
SUHARTO	GREGNGSENG PAMUJI

Dipindai dengan CamScanner

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERHUBUNGAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG TRANSPORTASI
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

Nomor : HK.201/10/19/ BPSDMP/2026
Nomor : B-100.3.7.1/1380/BUP

Pada hari ini Jumat, Tanggal Tiga Puluh Satu, Bulan Juli, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (31-07-2026) bertempat di Semarang, yang bertandatangan di bawah ini :

I. SUHARTO : Selaku Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 12/TPA Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**"; dan

II. ARDIANSYAH SULAIMAN : Selaku Bupati Kutai Timur, yang dilantik berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor : 100.2.1.3-221 Tahun 2025 Tanggal 28 Januari 2025, Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan Tahun 2025 -2030 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur, berkedudukan dan berkantor di Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta, Kutai Timur, untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **"PIHAK KEDUA"**;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Dipindai dengan CamScanner

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** menerangkan terlebih dahulu, secara sendiri-sendiri disebut **"PIHAK"** dan secara bersama-sama disebut sebagai **"PARA PIHAK"**.

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

(1) Bahwa **PIHAK KESATU** Institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang bertugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia di bidang transportasi;

(2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan dan memberikan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya;

(3) Pengisian Jabatan dilakukan dengan memperhatikan proyeksi kebutuhan 5 (lima) tahun serta Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ANJAB dan ABK) yang telah ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur;

(4) Bahwa dalam rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi Di Kabupaten Kutai Timur, diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK**.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang – undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana Ketentuan Pasal 238 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6838);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 84 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pendidikan dan Pelatihan serta Beasiswa di Bidang Transportasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 836);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 888);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115);
9. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
11. Keputusan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor KP-BPSDMP 203 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi di Kabupaten Kutai Timur dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama yang saling mendukung melalui kegiatan yang disepakati di dalam Kesepakatan Bersama ini.
2. Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah:
   a. Meningkatkan fungsi kepemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan di Kabupaten Kutai Timur;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Dipindai dengan CamScanner

b. Menjalin kemitraan strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengembangan sumber daya manusia perhubungan dengan mendayagunakan dan memberdayakan potensi serta peranan **PARA PIHAK** secara sinergi dan saling mendukung; dan

c. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam proses pembangunan yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Transportasi di Kabupaten Kutai Timur;
2. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
   a. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui kegiatan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
   b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU**;
   c. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia di bidang teknis transportasi yang dikembangkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) **PIHAK KEDUA;**
   d. Pelaksanaan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan kelancaran dan keselamatan transportasi di wilayah **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK KESATU;**
   e. Penyerapan lulusan program Pendidikan Vokasi yang berasal dari putra dan putri daerah dengan masa wajib kerja selama 10 (sepuluh) tahun oleh **PIHAK KEDUA;** dan
   f. Kerja sama bidang lainnya yang disepakati, sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

(1) Menyediakan SDM, sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kemampuan dan kewenangan **PARA PIHAK**;

(2) Memenuhi ketentuan di bidang pendidikan, pelatihan dan pengembangan SDM di bidang perhubungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Mengutamakan kelancaran tugas dan fungsi **PARA PIHAK**; dan

(4) Menjaga kerahasiaan **PARA PIHAK** dan tidak akan menyebarkan hasil-hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang Tugas, Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu;

(3) **PARA PIHAK** dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk dan/atau menugaskan satuan kerja atau organisasi terkait di lingkungan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi, tanggung jawab, dan kewenangannya;

(4) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak akan terpengaruh dengan terjadinya perubahan kepemimpinan;

(5) **PARA PIHAK** berhak untuk mengusulkan, menetapkan serta melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;

(6) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama dibuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dengan itikad baik dalam upaya melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing serta menghindari konflik kepentingan *(conflict of interest).*

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Biaya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** berdasarkan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan **PIHAK** yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan tidak memungkinkan dilaksanakan Kesepakatan Bersama ini;

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) Pemantauan dan evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sesuai kebutuhan;

(2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan adanya hal-hal yang memerlukan perbaikan, **PARA PIHAK** akan melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai dengan kewenangan masing-masing dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan tertulis dan disampaikan kepada pimpinan masing-masing **PIHAK** sebagai bahan pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam penafsiran/pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediator sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) Jika mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membuahkan hasil, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan perselisihan mengenai Kesepakatan Bersama ini beserta segala akibat hukumnya melalui Pengadilan.

Pasal 9
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

(1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Alamat yang dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Bagian Hukum, Humas, dan Umum,
Sekretariat Badan Pengembangan SDM Perhubungan,
Kementerian Perhubungan

Alamat	:	Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 5 Jakarta Pusat
Telepon	:	(021) 3456585
Email	:	sekretariat-bpsdmp@kemenhub.go.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur
u.p. Kepala Bagian Kerja Sama

Alamat	:	Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kawasan Pusat Pemeritanhan Bukit Pelangi, Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur Prov.Kaltim
Telepon	:	(0549) 25050
Email	:	moukerjasama01@gmail.com

(3) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana tercantum pada ayat Pasal ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kepada **PIHAK** lainnya sebelum alamat tersebut dinyatakan efektif.

Pasal 10
ADENDUM

(1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dengan kesepakatan **PARA PIHAK** dapat dilakukan perubahan tertulis (adendum) sebagaimana mestinya dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11
LAIN-LAIN

Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri dengan alasan tertentu tidak akan menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing- masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 12
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga) asli, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dilaksanakan dan dipatuhi oleh **PARA PIHAK** dan/atau yang mewakili dari masing-masing **PIHAK** oleh **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ARDIANSYAH SULAIMAN	**SUHARTO**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
.....	.....

Dipindai dengan CamScanner

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
PEMERINTAH KOTA BEKASI
TENTANG
SINERGI PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN PERKOTAAN BERBASIS JALAN DI KOTA BEKASI

NOMOR : HK. 201/20/7/DRJD/2025

NOMOR : 137 Tahun 2025

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. AAN SUHANAN : Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 6 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU;

II. TRI ADHIANTO TJAHYONO : Wali Kota Bekasi, berkedudukan di Bekasi Jl. Ahmad Yani Nomor 1, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bekasi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1719 Tahun 2025 tentang Perubahan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak mewakili Kota Bekasi, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas, Angkutan, Sarana, Prasarana, Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan dan Angkutan Multimoda, serta Peningkatan Keterpaduan Sistem Antar Moda dan Keselamatan Transportasi Darat.
2. PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bekasi yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Pentingnya pembangunan transportasi perkotaan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029) yaitu pada arah kebijakan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui pembangunan infrastruktur perkotaan salah satunya dengan penyediaan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan.
4. Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan massal perkotaan sebagai upaya guna meningkatkan konektivitas, mendukung kegiatan perekonomian, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kota Bekasi perlu dilakukan pengembangan angkutan massal berbasis jalan yang diwujudkan dalam rencana pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan.
5. Skema *Buy The Service* untuk angkutan massal perkotaan adalah mekanisme pembelian layanan angkutan massal oleh Pemerintah kepada operator dengan mekanisme lelang berdasarkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) atau *Quality Licensing* yang memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan serta memenuhi aspek Kesehatan.
6. Surat Direktur Jenderal Integrasi Transportasi dan Multimoda Nomor: AJ.005/1/05/DJITM/2025 tanggal 20 Juni 2025 perihal Pelimpahan BTS Kota Bekasi Tahun 2026.
7. Surat Walikota Bekasi Nomor: 500.11.8/3958/DISHUB.Angter Perihal Pengalihan Layanan BisKita.
8. Nota Kesepakatan Antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan/*Buy the Service* (BTS) di

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Kota Bekasi Nomor: SPJ.353 BPTJ Tahun 2023 Nomor 57 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023.

9. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
   a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
   b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
   c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
   d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
   e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
   g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
   h. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
   i. Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi tahun 2018 – 2029;
   j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

k. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

n. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

o. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

p. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengembangan, Pengelolaan dan Pengoperasian Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi (yang selanjutnya disebut Nota Kesepakatan) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Perkotaan berbasis jalan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
2. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antar kawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
3. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Perkotaan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Perkotaan secara minimal.
4. Skema *Buy The Service* yang selanjutnya disebut Skema BTS adalah skema penyediaan layanan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan dengan membeli layanan dari perusahaan angkutan umum.
5. Kawasan Perkotaan Bekasi adalah kawasan pada Kota Bekasi dengan tingkat aktivitas yang tinggi dan kebutuhan mendesak akan sistem angkutan umum yang berbasis jalan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

6. *Fleet Management System* adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan efisiensi terhadap fungsi administrasi dan manajemen yang mencakup operasional, pemeliharaan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia berbasis teknologi.
7. Manajemen Pengelola adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perencanaan operasional, pelaksanaan operasional, pengawasan operasional, monitoring dan evaluasi, serta perbaikan operasional dalam pemberian subsidi Angkutan Perkotaan.
8. *Push and Pull Strategy* adalah strategi yang mencakup kebijakan atau tindakan pemerintah yang membuat angkutan pribadi lebih sulit atau mahal (*Push*) dan melibatkan penawaran insentif, informasi, dan pilihan alternatif untuk mendorong perubahan perilaku perjalanan, mengekang kemacetan, dan mempromosikan transportasi multimoda (*Pull*).
9. Tarif adalah besaran biaya jasa angkutan orang dan/atau barang yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah berdasarkan jenis pelayanan, biaya operasional, dan kemampuan masyarakat.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini bermaksud untuk membangun komitmen dan menciptakan sinergi program dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka sinergi pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi sesuai kewenangan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui pembangunan infrastruktur perkotaan dengan penyediaan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi.

Pasal 3

LOKASI SINERGI

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini berada di wilayah Kota Bekasi.

Pasal 4

OBJEK SINERGI

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Pengembangan, Pengelolaan dan Pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi dengan Skema BTS.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

a. Perencanaan, Pengelolaan dan Pengembangan Koridor layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK;
b. Penggunaan Sistem Informasi *Fleet Management System;*
c. Melaksanakan sosialisasi layanan angkutan perkotaan di Kota Bekasi;
d. Pemantauan dan evaluasi oleh Manajemen Pengelola;
e. Melaksanakan Tarif Integrasi untuk layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi;
f. Melaksanakan *Push and Pull Strategy* untuk mendukung layanan angkutan perkotaan di Kota Bekasi.

Pasal 6

PELAKSANAAN

(1) Pengelolaan Koridor layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi dengan Skema BTS oleh PIHAK KESATU, pada koridor

Summarecon - Bantargebang (Pasar Alam Vida)

(2) Pengelolaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi.

(3) PARA PIHAK secara bersama-sama berkoordinasi dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

(4) PARA PIHAK menyusun perencanaan serta melaksanakan koordinasi dan pengendalian untuk kelancaran pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi dengan Skema BTS, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

(5) PARA PIHAK melakukan fasilitasi dan/atau menerbitkan izin yang terkait dengan penyelenggaraan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Trayek Pelaksanaan Operasional Layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi dengan Skema BTS dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil kajian dan/atau usulan PARA PIHAK yang ditetapkan oleh Walikota Kota Bekasi.

(7) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	2.

(8) Pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja yang menjadi tanggungjawab PARA PIHAK yang memerlukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dituangkan dalam Rencana Kerja.

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

a. menyiapkan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi sesuai dengan Pasal 6

b. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan penggunaan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan yang dikelola oleh PIHAK KESATU;

c. menyediakan *dashboard Fleet Management* bagi PIHAK KEDUA;

d. melakukan kegiatan publikasi dan sosialisasi terkait layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi dengan PIHAK KEDUA;

e. Melakukan tarif intregasi untuk layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi;

f. mempersiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan rutin kepada PIHAK KEDUA;

g. mempersiapkan penyediaan registrasi terhadap penumpang golongan tarif khusus untuk pelajar dan golongan khusus lainnya di Kota Bekasi;

h. PIHAK KESATU memberikan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas kepada PIHAK KEDUA; dan

i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan angkutan perkotaan di Kota Bekasi melalui manajemen pengelola.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:

a. menyiapkan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi sesuai dengan Pasal 5;

b. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan penggunaan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;

c. menetapkan dan/atau mengevaluasi peraturan perundang-undangan/regulasi daerah yang terkait dengan pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya;

d. menyiapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan penyiapan, pembangunan infrastruktur dan prasarana layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya;

f. menyusun dan mengkoordinasikan perizinan yang diperlukan terkait pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi sesuai dengan kewenangannya;

g. Menyediakan semua sumber daya keuangan, menyediakan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan layanan angkutan perkotaan berbasis jalan di Kota Bekasi sesuai dengan rencana kerja yang tercantum pada lampiran;

h. menyiapkan dan melaksanakan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka operasional layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi;

i. Melaksanakan sosialisasi dan mitigasi resiko terhadap dampak adanya layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi;

j. melaksanakan verifikasi terhadap penumpang golongan tarif khusus untuk pelajar dan golongan khusus lainnya di Kota Bekasi;

k. Merencanakan dan melaksanakaan langkah-langkah sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disepakati dalam rangka mendukung layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi; dan

l. Menerima pengalihan dan melanjutkan pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi secara bertahap.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak ditandatanganinya Nota Kesepakatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2028 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;

(2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 9

PENGAMBILALIHAN LAYANAN

Pengambilalihan layanan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan secara bertahap sesuai rencana kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

KERAHASIAAN DATA

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh untuk atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

(3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan

(2) PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada PIHAK KESATU dan/atau Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 13

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:

a. Jangka waktu telah berakhir dan Nota Kesepakatan tidak diperpanjang;
b. Terdapat ketentuan baru perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14

KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.

(2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi keadaan-keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkenal; dan

(3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.

(4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat memberitahukan kepada pihak lain dalam Nota Kesepakatan ini.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final dan binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 16

KORESPONDENSI

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan.

(2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

U.P	:	Direktur Angkutan Jalan
Alamat	:	Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta
Telepon	:	(021) 3456919

PIHAK KEDUA

Pemerintah Daerah Kota Bekasi

U.P	:	Dinas Perhubungan Kota Bekasi
Alamat	:	Jalan Pangeran Jayakarta Nomor 1
Telepon	:	(021) 89464722

(3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Rencana Kerja yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Nota Kesepakatan ini.

(2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

(4) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(5) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan/*Buy the Service* (BTS) di Kota Bekasi Nomor: SPJ.353 BPTJ Tahun 2023 Nomor 57 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
TRI ADHIANTO TJAHYONO	AAN SUHANAN

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

LAMPIRAN
Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Daerah Kota Bekasi
Tentang Sinergi Pengembangan, Pengelolaan dan Pengoperasian Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Bekasi
NOMOR : HK. 201/20/7/DRJD/2025
NOMOR : Nomor 137 Tahun 2025

RENCANA KERJA SINERGI PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN PERKOTAAN BERBASIS JALAN DI KOTA BEKASI

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
1	Penerbitan Regulasi	Menerbitkan Regulasi Daerah terkait Kewajiban Pelayanan Angkutan Umum dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mendukung Angkutan Massal Perkotaan	KOTA BEKASI	APBD	2025	Kota Bekasi	Peraturan Walikota Kota Bekasi/ tentang penyelenggaraan angkutan perkotaan di Kota Bekasi yang mencakup antara lain: 1. Rekayasa Lalu Lintas untuk mendukung BRT; 2. Kewajiban Pelayanan Transportasi Publik; 3. Penentuan Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Umum Massal Perkotaan (SPM);	Terselenggarakannya angkutan perkotaan di Kota Bekasi

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
							4. Penentuan Tarif Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan; 5. Integrasi Antar Moda Transportasi 6. Penanggulangan Kecelakaan dalam pengoperasian Sistem Angkutan Umum Massal; 7. Pengambilalihan Pengoperasian Armada BRT; dan 8. Penetapan trayek/RUJT.	
2	Penerbitan Regulasi	Review/Revisi Regulasi Daerah Perencanaan Daerah (Penyesuaian rencana BRT dalam dokumen RPJMD Kota Bekasi	KOTA BEKASI	APBD	2025	Kota Bekasi.	Peraturan Daerah RPJMD Kota Bekasi	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam RPJMD 2025 – 2029 Kota Bekasi
3.	Penyiapan Layanan Angkutan Perkotaan	Memberikan pendampingan teknis *dan* peningkatan kapasitas kepada Pemerintah Daerah, khususnya dalam melaksanakan implementasi Kegiatan	KOTA BEKASI	APBN	2025	Kementerian Perhubungan	Terlaksananya Pendampingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan kapasitas SDM pegawai pemerintah daerah Kota Bekasi

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
4.	Sosialisasi dan Publikasi	Melakukan publikasi dan sosialisasi terkait operasional layanan angkutan perkotaan di Kota Bekasi	KOTA BEKASI	APBN / APBD	2025	Kementerian Perhubungan	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi tentang operasional layanan angkutan perkotaan di Kota Bekasi	Menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan massal perkotaan di Provinsi Kota Bekasi
5.	Sosialisasi dan Publikasi	Melakukan publikasi dan sosialisasi terkait operasional layanan angkutan perkotaan di Kota Bekasi	KOTA BEKASI	APBD	2025	Pemerintah Kota Bekasi	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi tentang operasional layanan angkutan perkotaan di Kota Bekasi	Menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan massal perkotaan di Kota Bekasi
6.	Layanan angkutan perkotaan di Kota Bekasi	Memberikan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS Rute: Summarecon - Bantargebang (Pasar Alam Vida);	KOTA BEKASI	APBN	2025	Kementerian Perhubungan,	Jumlah layanan dan koridor	Terselenggara nya layanan angkutan massal perkotaan di Kota Bekasi.
7.	Handover Kepada Pemerintah Kota Bekasi.	Menyiapkan anggaran sebagai bentuk komitmen keberlanjutan layanan angkutan perkotaan di Kota Bekasi. Rute: Summarecon - Bantargebang (Pasar Alam Vida);	KOTA BEKASI	APBD	2026	Pemerintah Kota Bekasi.	Pendanaan operasional BRT di Kota Bekasi.	Pengambilalih an layanan dan keberlanjutan angkutan massal perkotaan di Kota Bekasi.
8.	Mitigasi Angkutan Eksisting	Implementasi *re-routing* angkutan kota yang berhimpitan dengan layanan angkutan perkotaan, meliputi sosialisasi, masa uji coba, pengawasan pelaksanaan	KOTA BEKASI	APBD	2026	Pemerintah Kota Bekasi	Terlaksananya *re-routing* dan sosialisasi	Berkurangnya resitensi dengan angkutan lokal yang berhimpitan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
								dengan layanan angkutan massal perkotaan
9.	Layanan penunjang angkutan perkotaan	Pengadaan *fleet management System*	KOTA BEKASI	APBN	2025	Kementerian Perhubungan	Terlaksanakanny a pengawasan dan monitoring secara real time	Standar pelayanan Minimal tercapai dan pemerintah dapat melakukan pengawasan secara realtime
10.	*Push and Pull Strategy*	1. Melaksanakan sosialisasi kepada Sekolah, kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat di Kota Bekasi. 2. Melaksanakan MRLL di koridor yang dilayani oleh angkutan perkotaan di di Kota Bekasi. 3. Menyediakan infrastruktur penunjang layanan angkutan perkotaan	KOTA BEKASI	APBD	2025	Pemerintah Kota Bekasi.	Terlaksananya *push and pull strategy* dengan melaksanakan sosialisasi, MRLL dan beberapa kebijakan yang mendorong minat masyarakat untuk naik angkutan umum	Peningkatan pengguna layanan angkutan massal perkotaan
11.	Layanan penunjang angkutan perkotaan	Pengadaan Sistem pembayaran *(tarif)*	KOTA BEKASI	APBN	2025	Kementerian Perhubungan	Terlaksanakanny a pembayaran dan pemungutan tarif terhadap layanan angkutan perkotaan	Masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui kartu uang elektronik (KUE) dan Q-ris dengan lancar

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
12.	Evaluasi Pelayanan Angkutan Perkotaan di Kota Bekasi.	Melaksanakan evaluasi secara berkala dan *rerouting* terhadap layanan angkutan perkotaan	KOTA BEKASI	APBD dan APBN	2025	Pemerintah Kota Bekasi. dan Kementerian Perhubungan	Perubahan rute	Peningkatan jumlah penumpang
13.	Pengawasan Pelayanan Angkutan Perkotaan di Kota Bekasi.	Melakukan pengawasan harian terhadap SPM dan SOP	KOTA BEKASI	APBN	2025	Kementerian Perhubungan	Terselenggaranya layanan angkutan perkotaan sesuai dengan SOP dan SPM	Terselenggaranya layanan angkutan perkotaan di Kota Bekasi.sesuai dengan SOP dan SPM
14.	Registrasi golongan tarif khusus di Kota Bekasi.	Mempersiapkan penyediaan registrasi terhadap penumpang golongan tarif khusus untuk pelajar dan golongan khusus lainya di Kota Bekasi.	KOTA BEKASI	APBN	2025	Kementerian Perhubungan dan Dinas perhubungan Kota Bekasi.	Terselenggaranya registrasi golongan tarif khusus di Kota Bekasi menggunakan aplikasi	Terlaksananya program tarif khusus di Kota Bekasi.sehing ga menarik minat masyarakat untuk menggunakan layanan angkutan perkotaan
15.	Verifikasi registrasi golongan tarif khusus di Kota Bekasi.	Melaksanakan verifikasi terhadap penumpang golongan tarif khusus untuk pelajar dan golongan khusus lainnya di Kota Bekasi.	KOTA BEKASI	APBD	2025	Dinas Perhubungan Kota Bekasi.	Terlaksananya proses verifikasi oleh dinas perhubungan Kota Bekasi.	Terlaksananya program tarif khusus di Kota Bekasi. sehingga menarik minat masyrakat untuk menggunakan layanan

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
								angkutan perkotaan

PIHAK KEDUA,

TRI ADHIANTO TJAHYONO

PIHAK KESATU,

METERAI TEMPEL
25068ANX120126254

AAN SUHANAN

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Rencana Kerja yang terlampir dalam Nota Kesepakatan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Nota Kesepakatan ini.

(2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

(4) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(5) Dengan ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, maka Nota Kesepakatan antara Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan, Pengembangan, dan Pengoperasian Angkutan Umum Perkotaan Dengan Skema Pembelian Layanan/*Buy the Service* (BTS) di Kota Bekasi Nomor: SPJ.353 BPTJ Tahun 2023 Nomor 57 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
TRI ADHIANTO TJAHYONO	AAN SUHANAN

PIHAK KESATU	
PIHAK KEDUA	

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DAN

PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

TENTANG

SINERGI PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN PERKOTAAN BERBASIS JALAN DI KOTA SURAKARTA

NOMOR: HK.201/25/9/DRJD/2025

NOMOR: B / 100.2.2.3 / 4156

Pada hari ini, Selasa, tanggal tiga puluh, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh lima (30-12-2025), bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. AAN SUHANAN : Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, berkedudukan di Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 74/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 6 Mei 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RESPATI ACHMAD ARDIANTO : Wali Kota Surakarta, berkedudukan di Kota Surakarta, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-221 Tahun 2025 tanggal 28 Januari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala

Daerah Serentak Tahun 2024 Masa Jabatan 2025-2030, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Surakarta, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Nota Kesepakatan ini secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU merupakan instansi Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyelenggaraan Lalu Lintas, Angkutan, Sarana, Prasarana, Sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, Penyeberangan, dan Angkutan Multimoda, serta Peningkatan Keterpaduan Sistem Antar Moda dan Keselamatan Transportasi Darat.
2. PIHAK KEDUA merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Surakarta.
3. Pentingnya pembangunan transportasi perkotaan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2025-2029) yaitu pada arah kebijakan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui pembangunan infrastruktur perkotaan salah satunya dengan penyediaan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan.
4. Skema *Buy The Service* untuk angkutan massal perkotaan adalah mekanisme pembelian layanan angkutan massal oleh Pemerintah kepada operator dengan mekanisme lelang berdasarkan Standar Pelayanan Minimal atau Quality Licensing yang memenuhi aspek kenyamanan, keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan serta memenuhi aspek Kesehatan.
5. Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
    a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
    b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
h. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
i. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
j. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga; dan
l. Nota Nota Kesepakatan antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dengan Pemerintah Kota Surakarta Nomor NK.201/20/6/DRJD/2024 dan HB.23/4850/2024 tentang Sinergi Pengembangan, Pengelolaan Dan Pengoperasian Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing bersepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Pengembangan, Pengelolaan dan Pengoperasian Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta (selanjutnya disebut Nota Kesepakatan) dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelayanan angkutan massal perkotaan sebagai upaya guna meningkatkan konektivitas, mendukung kegiatan perekonomian, dan perbaikan kualitas lingkungan hidup di Kawasan Perkotaan Surakarta perlu dilakukan pengembangan angkutan massal berbasis jalan yang diwujudkan dalam rencana pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan.

Pasal 2

KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Perkotaan berbasis jalan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan perkotaan yang terikat dalam trayek.
2. Kawasan Perkotaan adalah kesatuan wilayah terbangun dengan kegiatan utama bukan pertanian, memiliki kerapatan penduduk yang tinggi, fasilitas prasarana jaringan transportasi jalan, dan interaksi kegiatan antarkawasan yang menimbulkan mobilitas penduduk yang tinggi.
3. Standar Pelayanan Minimal Angkutan Perkotaan yang selanjutnya disebut Standar Pelayanan Minimal adalah persyaratan penyelenggaraan Angkutan Perkotaan mengenai jenis dan mutu pelayanan yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa Angkutan Perkotaan secara minimal.
4. Skema *Buy The Service* yang selanjutnya disebut Skema BTS adalah skema penyediaan layanan angkutan penumpang umum di Kawasan Perkotaan dengan membeli layanan dari perusahaan angkutan umum.
5. Kawasan Perkotaan Surakarta adalah kawasan perkotaan pada kecamatan.
6. *Fleet Management System* adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan efisiensi terhadap fungsi administrasi dan manajemen yang mencakup operasional, pemeliharaan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan sumber daya manusia berbasis teknologi.
7. Manajemen Pengelola adalah badan usaha yang melakukan kegiatan perencanaan operasional, pelaksanaan operasional, pengawasan operasional, monitoring dan evaluasi, serta perbaikan operasional dalam pemberian subsidi Angkutan Perkotaan.
8. *Push and Pull Strategy* adalah strategi yang mencakup kebijakan atau tindakan pemerintah yang membuat angkutan pribadi lebih sulit atau mahal (*Push*) dan melibatkan penawaran insentif, informasi, dan pilihan alternatif untuk mendorong

perubahan perilaku perjalanan, mengekang kemacetan, dan mempromosikan transportasi multimoda (*Pull*).

Pasal 3

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepakatan ini bermaksud untuk membangun komitmen dan menciptakan sinergi program dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka sinergi pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta sesuai kewenangan PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepakatan ini bertujuan mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui pembangunan infrastruktur perkotaan dengan penyediaan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta dengan Skema BTS.

Pasal 4

OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Pengembangan, Pengelolaan dan Pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta dengan Skema BTS.

Pasal 5

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:

a. perencanaan, pengelolaan dan pengembangan koridor layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta;
b. penggunaan Sistem Informasi *Fleet Management;*
c. melaksanakan sosialisasi layanan angkutan perkotaan di Kota Surakarta;
d. pemantauan dan evaluasi oleh Manajemen Pengelola;
e. melaksanakan Tarif Integrasi untuk layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta; dan
f. melaksanakan *Push and Pull Strategy* untuk mendukung layanan angkutan perkotaan di Kota Surakarta.

Pasal 6

PELAKSANAAN

(1) Pengelolaan Koridor layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta dengan Skema BTS oleh PIHAK KESATU, meliputi koridor:
   a. HALTE BANDARA ADI SOEMARMO - TERMINAL PALUR

(2) Pengelolaan Koridor layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta dengan Skema BTS oleh PIHAK KEDUA, meliputi koridor:
   a. KORIDOR 2 : SUB TERMINAL KERTEN – TERMINAL PALUR;
   b. KORIDOR 3 : TERMINAL KARTASURA – TAMAN LANSIA;
   c. KORIDOR 4 : TERMINAL KARTASURA – TERMINAL PALIR;
   d. KORIDOR 5 : TERMINAL KARTASURA – SIMPANG SIDAN BEKONANG;
   e. KORIDOR 7 : RSUD NGIPANG – PASAR KLEWER;
   f. KORIDOR 8 : LOTTE MART – SUB TERMINAL PELANGI MOJOSONGO;
   g. KORIDOR 9 :SUB TERMINAL SEMANGGI – SUB TERMINAL PELANGI MOJOSONGO;
   h. KORIDOR 10 : PASAR KLEWER – TERMINAL PALUR;
   i. KORIDOR 12 : PASAR KLEWER – LUWES GENTAN.

(3) Pengelolaan koridor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan evaluasi.

(4) PARA PIHAK secara bersama-sama berkoordinasi dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

(5) PARA PIHAK menyusun perencanaan serta melaksanakan koordinasi dan pengendalian untuk kelancaran pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta dengan Skema BTS, sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya.

(6) PARA PIHAK melakukan fasilitasi dan/atau menerbitkan izin yang terkait dengan penyelenggaraan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Trayek Pelaksanaan operasional layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta dengan Skema BTS dilakukan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan hasil kajian dan/atau usulan PARA PIHAK yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

(8) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dituangkan dalam Rencana Kerja yang tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(9) Pelaksanaan kegiatan dalam Rencana Kerja yang menjadi tanggungjawab PARA PIHAK yang memerlukan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing PIHAK dituangkan dalam Rencana Kerja.

Pasal 7

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:
   a. menyiapkan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta;
   b. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan penggunaan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan yang dikelola oleh PIHAK KESATU;
   c. menyediakan *dashboard Fleet Management* Mitra Darat bagi PIHAK KEDUA;
   d. melakukan kegiatan publikasi dan sosialisasi terkait layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta bersama dengan PIHAK KEDUA;
   e. melakukan tarif intregasi untuk layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta;
   f. mempersiapkan dan menyampaikan laporan pelaksanaan rutin kepada PIHAK KEDUA;
   g. mempersiapkan penyediaan registrasi terhadap penumpang golongan tarif khusus untuk pelajar dan golongan khusus lainya di kota Surakarta;
   h. PIHAK KESATU memberikan pendampingan teknis dan peningkatan kapasitas kepada PIHAK KEDUA; dan
   i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap layanan angkutan perkotaan di Kota Surakarta melalui manajemen pengelola.
(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu:
   a. menyiapkan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta;
   b. menyiapkan data dan informasi yang berkaitan dengan penggunaan layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA;
   c. menetapkan dan/atau mengevaluasi peraturan perundang-undangan/regulasi daerah yang terkait dengan pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta sesuai dengan kewenangannya;
   d. menyiapkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk memastikan pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. melakukan penyiapan, pembangunan infrastruktur dan prasarana layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta sesuai dengan kewenangannya;
f. melakukan tarif intregasi untuk layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta;
g. menyusun dan mengkoordinasikan perizinan yang diperlukan terkait pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta sesuai dengan kewenangannya;
h. berkomitmen dan menyediakan secara tepat waktu, semua sumber daya keuangan dan lainnya, menyediakan anggaran dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan layanan angkutan perkotaan berbasis jalan di kota Surakarta sesuai dengan rencana kerja yang tercantum pada lampiran;
i. menyiapkan dan melaksanakan Manajemen Rekayasa Lalu Lintas dalam rangka operasional layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta;
j. melaksanakan sosialisasi dan mitigasi resiko terhadap dampak adannya layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta;
k. melaksanakan verifikasi terhadap penumpang golongan tarif khusus untuk pelajar dan golongan khusus lainya di kota Surakarta;
l. merencanakan dan melaksanakaan langkah langkah sesuai dengan Rencana Kerja yang telah disepakati dalam rangka mendukung layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta; dan
m. menerima pengalihan dan melanjutkan pengembangan, pengelolaan dan pengoperasian layanan Angkutan Perkotaan Berbasis Jalan di Kota Surakarta secara bertahap ataupun sekaligus.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepakatan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), maka harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9

PENGAMBILALIHAN LAYANAN

Pengambilalihan layanan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan dengan beberapa cara:

a. pengambilalihan layanan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah berakhirnya Nota Kesepakatan ini;
b. pengambilalihan layanan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini secara bertahap; dan
c. pengambilalihan layanan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dapat dilakukan sekaligus sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 10

KERAHASIAAN DATA

(1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi, dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepekatan ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh untuk atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada pihak lain manapun, tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.
(3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) akan terus berlangsung dan mengikat PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepakatan ini berakhir.

Pasal 11

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang dilakukan secara berkala melalui rapat koordinasi, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
(2) PARA PIHAK menunjuk pejabat terkait pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dijadikan sebagai bahan pertimbangan kelanjutan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.

Pasal 12

PEMBIAYAAN

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara PIHAK KESATU;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah PIHAK KEDUA; dan
c. Sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:
    a. Jangka waktu telah berakhir dan Nota Kesepakatan tidak diperpanjang;
    b. Kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis; dan
    c. Terdapat ketentuan baru perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan ini.
(2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Huruf b dan ayat (1) huruf c dituangkan dalam kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

(1) PARA PIHAK sepakat bahwa Keadaan Kahar tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
(2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), meliputi, namun tidak terbatas pada keadaan-keadaan perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, wabah penyakit, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa Keadaan Kahar, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-

peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkenal.

(3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), PIHAK yang terkena Keadaan Kahar harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar.

(4) Dalam hal Keadaan Kahar terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak Keadaan Kahar tersebut dapat memberitahukan kepada pihak lain dalam Nota Kesepakatan ini.

(5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada Ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Apabila terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

(2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui mediasi, dimana masing-masing akan menunjuk seorang wakilnya, dan seorang Mediator yang ditunjuk bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Keputusan Mediator sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), merupakan keputusan yang bersifat final dan mengikat (*final dan binding*) terhadap PARA PIHAK.

Pasal 16

SURAT - MENYURAT

(1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung yang bertanggung jawab untuk korespondensi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan.

(2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan

U.P : Direktur Angkutan Jalan

Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta

Telepon : (021) 3456919

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Surakarta

U.P : Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta

Alamat : Jalan Menteri Supeno no. 7, Manahan, Kota Surakarta

Telepon : (0271) 717470

(3) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada PARA PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini, paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

(4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat tersebut atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

Pasal 17

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Hal yang belum diatur dan/atau adanya perubahan ketentuan dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam Adendum Nota Kesepakatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

(2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

(3) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
RESPATI ACHMAD ARDIANTO	AAN SUHANAN

RENCANA KERJA SINERGI PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN ANGKUTAN PERKOTAAN BERBASIS JALAN DI KOTA SURAKARTA

PIHAK KESATU
Direktorat Jenderal Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan

PIHAK KEDUA
Pemerintah Kota Surakarta

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
1	Penerbitan Regulasi	Menerbitkan Regulasi Daerah terkait Kewajiban Pelayanan Angkutan Umum dan Rekayasa Lalu Lintas untuk mendukung Angkutan Massal Perkotaan	Surakarta	APBD Kota Surakarta	2026	Pemerintah Kota Surakarta	Peraturan Wali Kota Surakarta tentang penyelenggaraan angkutan perkotaan di Kota Surakarta yang mencakup antara lain: 1. Rekayasa Lalu Lintas untuk mendukung BRT; 2. Kewajiban Pelayanan Transportasi Publik;	Terselenggaranya angkutan perkotaan di Kota Surakarta

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
							3. Penentuan Standar Pelayanan Minimum untuk Angkutan Umum Masal Perkotaan (SPM); 4. Penentuan Tarif Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan; 5. Integrasi Antar Moda Transportasi; 6. Penanggulangan Kecelakaan dalam pengoperasian Sistem Angkutan Umum Massal; 7.Pengambilalihan Pengoperasian Armada BRT; dan	

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
							8. Penetapan trayek/RUJT.	
2.	Penerbitan Regulasi	Review/Revisi Regulasi Daerah Perencanaan Daerah (Penyesuaian rencana BRT dalam dokumen RPJMD Kota Surakarta	Surakarta	APBD Kota Surakarta	2026	Pemerintah Kota Surakarta	Peraturan Daerah RPJMD Kota Surakarta	Tersusunnya kebijakan penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam RPJMD 2025 – 2029 Kota Surakarta
3.	Penyiapan Layanan Angkutan Perkotaan	Memberikan pendampingan teknis *dan* peningkatan kapasitas kepada Pemerintah Daerah, khususnya dalam melaksanakan implementasi Kegiatan	Surakarta	APBN	2026	Kementerian Perhubungan	Terlaksananya Pendampingan Teknis dan Peningkatan Kapasitas	Peningkatan kapasitas SDM pegawai Pemerintah Daerah Kota Surakarta

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
4.	Sosialisasi dan Publikasi	Melakukan publikasi dan sosialisasi terkait operasional layanan angkutan perkotaan di Kota Surakarta	Surakarta	APBN	2026	Kementerian Perhubungan	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi tentang operasional layanan angkutan perkotaan di Kota Surakarta	Menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan massal perkotaan di Kota Surakarta
5.	Sosialisasi dan Publikasi	Melakukan publikasi dan sosialisasi terkait operasional layanan angkutan perkotaan di Kota Surakarta	Surakarta	APBD	2026	Pemerintah Kota Surakarta	Terlaksananya publikasi dan sosialisasi tentang operasional layanan angkutan perkotaan di Kota Surakarta	Menarik minat masyarakat untuk menggunakan angkutan massal perkotaan di Kota Surakarta
6.	Layanan angkutan perkotaan di kota Surakarta	Memberikan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS	Surakarta	APBN	2026	Kementerian Perhubungan,	Jumlah layanan dan koridor	Terselenggaranya layanan angkutan massal perkotaan di Kota Surakarta

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
7.	Layanan angkutan perkotaan di kota Surakarta	Memberikan layanan angkutan perkotaan dengan skema BTS	Surakarta	APBD	2026	Kementerian Perhubungan,	Jumlah layanan dan koridor	Terselenggaranya layanan angkutan massal perkotaan di Kota Surakarta
8.	Handover oleh pemerintah kota Surakarta	Menyiapkan anggaran dalam bentuk pembelian layanan sebagai bentuk komitmen kerberlanjutan layanan angkutan perkotaan di kota Surakarta	Surakarta	APBD Kota Surakarta	2026	Pemerintah kota Surakarta	Pendanaan operasional BRT Kota Surakarta	Pengambilalihan layanan dan keberlanjutan angkutan massal perkotaan di Kota Surakarta
9.	Mitigasi Angkutan Eksisting	Implementasi *re-routing* angkutan kota yang berhimpitan dengan layanan angkutan perkotaan, meliputi sosialisasi, masa uji	Surakarta	APBD Kota Surakarta	2026	Pemerintah Kota Surakarta	Terlaksananya *re-routing* dan sosialisasi	Berkurangnya resitensi dengan angkutan lokal yang berhimpitan dengan layanan

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
		coba, pengawasan pelaksanaan						angkutan massal perkotaan
10.	Layanan penunjang angkutan perkotaan	Pengadaan *fleet management System*	Surakarta	APBN	2026	Kementerian Perhubungan	Terlaksanakannya pengawasan dan monitoring secara real time	Standar pelayanan Minimal tercapai dan pemerintah dapat melakukan pengawasan secara realtime
11.	*Push and Pull Strategy*	1. Melaksanakan sosialisasi kepada Sekolah, kepada pemerintah daerah dan seluruh masyarakat Kota Surakarta 2. Melaksanakan MRLL di koridor yang dilayani oleh angkutan	Surakarta	APBD Kota Surakarta	2026	Pemerintah Kota Surakarta	Terlaksananya push and pull strategy dengan melaksanakan sosialisasi, MRLL dan beberapa kebijakan yang mendorong minat masyarakat untuk	Peningkatan pengguna layanan angkutan massal perkotaan

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
		perkotaan di Kota Surakarta 3. Menyediakan infrastuktur penunjang layanan angkutan perkotaan					naik angkutan umum	
12.	Layanan penunjang angkutan perkotaan	Pengadaan Sistem pembayaran *(tarif)*	Surakarta	APBN	2026	Kementerian Perhubungan	Terlaksanakannya pembayaran dan pemungutan tarif terhadap layanan angkutan perkotaan	Masyarakat dapat melakukan pembayaran melalui kartu uang elektronik (KUE) dan Q-ris dengan lancar
13.	Evaluasi Pelayanan Angkutan Perkotaan di	Melaksanakan evaluasi secara berkala dan *rerouting* terhadap layanan angkutan perkotaan	Surakarta	APBD Kota Surakarta dan APBN	2026	Pemerintah Kota Surakarta dan Kementerian Perhubungan	Perubahan rute	Peningkatan jumlah penumpang

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
	Kota Surakarta							
14.	Pengawasan Pelayanan Angkutan Perkotaan di Kota Surakarta	Melakukan pengawasan harian terhadap SPM dan SOP	Surakarta	APBN	2026	Kementerian Perhubungan	Terselenggarannya layanan angkutan perkotaan sesuai dengan SOP dan SPM	Terselenggaranny a layanan angkutan perkotaan di kota Surakarta sesuai dengan SOP dan SPM
15	Registrasi golongan tarif khusus di Kota Surakarta	Mempersiapkan penyediaan registrasi terhadap penumpang golongan tarif khusus untuk pelajar dan golongan khusus lainya di kota Surakarta	Surakarta	APBN	2026	Kementerian Perhubungan dan Dinas perhubungan Kota Surakarta	Terselenggaraanya registrasi golongan tarif khusus di kota Surakarta menggunakan aplikasi	Terlaksananya program tarif khusus di kota Surakarta sehingga menarik minat masyrakat untuk menggunakan

No.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	TAHUN	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
								layanan angkutan perkotaan
16	Verifikasi registrasi golongan tarif khusus di kota Surakarta	Melaksanakan verifikasi terhadap penumpang golongan tarif khusus untuk pelajar dan golongan khusus lainya di kota Surakarta	Surakarta	APBD	2026	Dinas Perhubungan Kota Surakarta	Terlaksananya proses verifikasi oleh dinas perhubungan kota Surakarta	Terlaksananya program tarif khusus di kota Surakarta sehingga menarik minat masyrakat untuk menggunakan layanan angkutan perkotaan

PIHAK KEDUA

RESPATI ACHMAD ARDIANTO

PIHAK KESATU

AAN SUHANAN

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA

TENTANG

PENYELENGGARAAN FASILITAS PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA JALAN KHUSUS KAWASAN DI KAWASAN INDUSTRI
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA

NOMOR : HK.201/14/4/DRJD/2026
NOMOR : 003/SPKS/DOP/DOP.HSSE/06/2026

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (22 - 06 - 2026), bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

Dr. Drs. AAN SUHANAN, M.Si. : Direktur Jenderal Perhubungan Darat dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/TPA Tahun 2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Perhubungan Tanggal 6 Mei 2025, berkedudukan dan beralamat di Jalan Merdeka Barat No.8, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

MUHAMMAD ISRAN : Direktur Operasional PT Kawasan Berikat Nusantara berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Kawasan Berikat Nusantara Nomor 10 tanggal 28 Juni 1986, dibuat di hadapan Lies Rahalus Rusadi, S.H., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : C2.1957-HT0101 Th. 1987 tanggal 7 Maret 1987 dan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 39 tanggal 13 Mei 1988, Tambahan Nomor: 480, dan perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 09 tanggal 18 Oktober 2023, dibuat di hadapan Alfi Irpansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-0064873.AH.01.02. Tahun 2023 tanggal 24 Oktober 2023, serta perubahan data perseroan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor: 07 tanggal 26 September 2024 yang dibuat di hadapan Alfi Irpansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, dan pemberitahuan perubahan data perseroan telah sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum pada tanggal 26 September 2024 Nomor: AHU-AH.01.09-0256185, yang berkedudukan di Jalan Raya Cakung Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukan masing-masing menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK KESATU merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelaksanaan kebijakan dibidang transportasi darat;
2. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan perusahaan/badan usaha pengelola kawasan yang bertanggung jawab dalam penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana, memelihara infrastruktur, manajemen serta layanan untuk mendukung kegiatan industri di dalam kawasan tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, pengoperasian fasilitas penimbangan oleh pengelola kawasan dilaksanakan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat dengan Pengelola Kawasan untuk mendapatkan penetapan pengoperasian oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor Pada Jalan Khusus Kawasan Di Kawasan Industri PT Kawasan Berikat Nusantara (yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama), dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Danareksa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6916);
12. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1986 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat Nusantara;
13. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 1992 tentang Penunjukan dan Penetapan Wilayah Usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36 Tahun 2019 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 04/M-Ind/Per/1/2014 Tentang Pemberian Rekomendasi Bagi Perusahaan Di Kawasan Berikat Untuk Melakukan Penjualan Hasil Produksi Kawasan Berikat Ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Dan Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor Di Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 529);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.04/ 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.04/2018 tentang Kawasan Berikat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 668);
17. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 tanggal 03 Maret 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2023 Nomor 262);
18. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: PR-DRJD 1 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengoperasian Alat Penimbangan Kendaraan Bermotor Metode Dinamis di Jalan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

19. Surat PT Danantara Asset Management Nomor: SR.055/DI-DAM/DO/2026 Perihal Dukungan Implementasi Dan Kepatuhan Terhadap Kebijakan Zero ODOL Tahun 2027 Di Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("BUMN").

PASAL 2
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Direktorat Jenderal, yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal Perhubungan Darat adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
2. Perusahaan Kawasan Industri, yang selanjutnya disebut pengelola kawasan industri adalah perusahaan yang mengusahakan pengembangan dan pengelolaan kawasan industri.
3. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri.
4. Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/ atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
5. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.
6. Fasilitas Penimbangan adalah fasilitas penimbangan yang dipasang secara tetap yang terdiri atas fasilitas utama dan fasilitas penunjang yang berfungsi untuk pengawasan muatan angkutan barang.
7. Alat penimbangan adalah seperangkat alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindahkan.
8. Alat penimbangan metode statis Adalah alat penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi berhenti.
9. Alat penimbangan metode dinamis yang selanjutnya disebut *Weigh in Motion* (WIM) adalah alat penimbangan kendaraan bermotor dalam posisi bergerak.
10. Penyelenggaraan Fasilitas Penimbangan adalah kegiatan pembangunan dan pengadaan, pengoperasian dan penutupan, pemeliharaan, fasilitas penimbangan sesuai dengan kewenangannya.
11. Sistem Informasi Penimbangan adalah sistem berbasis teknologi informasi yang didukung dengan aplikasi penimbangan atau peralatan yang memiliki kemampuan paling sedikit:
    a. merekam hasil penimbangan kendaraan secara otomatis dan mengambil gambar kendaraan yang ditimbang;
    b. mengidentifikasi data kendaraan dengan menggunakan data yang telah dimiliki Direktorat Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

c. mengukur dimensi kendaraan beserta muatannya;
d. mengevaluasi data, baik yang ditampilkan secara matrik maupun grafik; dan
e. mengirim data penimbangan kepada Direktorat Jenderal.

12. Pemeliharaan Fasilitas Penimbangan adalah kegiatan menjaga keandalan, keselamatan, dan fungsi Fasilitas Penimbangan yang meliputi fasilitas utama, fasilitas penunjang, alat penimbangan, sistem pemindai data kendaraan, rambu dan marka, serta sarana keselamatan lainnya.
13. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
14. Penetapan Pengoperasian adalah keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat yang memberikan persetujuan atas pengoperasian Fasilitas Penimbangan oleh Pengelola Kawasan Industri berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 3
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pengelola Kawasan Industri dalam penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang berada di dalam kawasan industri atau pada jalan khusus dalam kawasan.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk:
a. mendukung upaya pencegahan pelanggaran daya angkut dan dimensi kendaraan bermotor yang dapat berdampak pada keselamatan lalu lintas dan kerusakan infrastruktur jalan;
b. mendukung terselenggaranya pengawasan muatan angkutan barang di dalam kawasan industri secara tertib dan terukur;
c. menjamin pengoperasian Fasilitas Penimbangan oleh Pengelola Kawasan Industri tetap berada dalam batas kewenangan Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
d. memastikan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor terpelihara dan berfungsi optimal;
e. Mendukung ketersediaan data operasional fasilitas penimbangan untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
f. mewujudkan sinergi antara Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dan Pengelola Kawasan Industri dalam pengoperasian Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor secara efektif, efisien, dan akuntabel.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 4
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup perjanjian kerja sama ini meliputi :
1. Penetapan Lokasi;
2. Pembangunan dan pengadaan;
3. Pengoperasian;
4. Pemeliharaan;
5. Penyediaan dan pengelolaan sistem informasi terintegrasi;
6. Penyampaian data operasional penimbangan.

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerja Sama ini berhak:
   a. Mendapatkan dokumen perencanaan teknis dan spesifikasi teknis fasilitas penimbangan untuk dilakukan evaluasi;
   b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama;
   c. Mendapatkan daftar personil yang akan melaksanakan pengoperasian, pelaksanaan sistem informasi dan pemeliharaan fasilitas penimbangan;
   d. Menetapkan kebijakan, pedoman, dan ketentuan teknis terkait pengoperasian Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Memperoleh laporan dan data hasil penimbangan secara berkala untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan.

(2) PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini berhak:
   a. Mendapatkan salinan dokumen penetapan lokasi fasilitas penimbangan pada kawasan industri;
   b. Mendapatkan salinan dokumen penetapan pengoperasian fasilitas penimbangan pada kawasan industri;
   c. Mendapatkan evaluasi dan persetujuan atas dokumen teknis pembangunan fasilitas penimbangan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
   d. Mendapatkan salinan petunjuk teknis penyelenggaraan fasilitas penimbangan kendaraan bermotor pada kawasan industri;
   e. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Penimbangan Kendaraan Bermotor yang berada di dalam kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   f. Memperoleh pembinaan dan arahan pengoperasian Fasilitas Penimbangan pada kawasan industri;
   g. Memperoleh informasi dan koordinasi yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan kerja sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(3) PIHAK KESATU dalam Perjanjian Kerja Sama ini berkewajiban:
   a. Menetapkan lokasi fasilitas penimbangan sesuai dengan justifikasi teknis kelayakan pembangunan fasilitas penimbangan pada Kawasan Industri;
   b. Melakukan evaluasi dan memberikan persetujuan atas dokumen teknis pembangunan fasilitas penimbangan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
   c. Melakukan monitoring dan evaluasi selama proses pelaksanan pembangunan fasilitas penimbangan dan sistem informasinya;
   d. Menetapkan pengoperasian fasilitas penimbangan dan menyerahkan salinan dokumen penetapan pengoperasian fasilitas penimbangan di kawasan industri;
   e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengoperasian Fasilitas Penimbangan sesuai dengan kewenangan.

(4) PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerja Sama ini berkewajiban:
   a. Melaksanakan penyediaan lahan untuk Fasilitas Penimbangan yang masih berada didalam Kawasan Industri;
   b. Melaksanakan penyusunan dan penyampaian dokumen perencanaan teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   c. Melaksanakan pembangunan dan pengadaan, serta sistem informasi sesuai dengan arsitektur yang dibutuhkan pada Fasilitas Penimbangan;
   d. Melaksanakan pengoperasian dan pemeliharaan Fasilitas Penimbangan pada kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Menyediakan personil yang kompeten dalam pengoperasian fasilitas penimbangan dan pengelolaan sistem informasi;
   f. Menyampaikan laporan dan data pengoperasian Fasilitas Penimbangan secara berkala.

PASAL 6
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bertahap sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan pengadaan dan pembangunan fasilitas penimbangan dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA dengan titik lokasi berada pada jalan khusus kawasan pada kawasan industri oleh PIHAK KEDUA;
   b. Penyampaian dokumen perencanaan teknis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU;
   c. Evaluasi dan persetujuan dokumen perencanaan teknis oleh PIHAK KESATU;
   d. Pengujian fungsi dan verifikasi kelayakan operasional penimbangan;
   e. Pelaksanaan pengoperasian dan pemeliharaan fasilitas penimbangan oleh PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(2) Dokumen perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat:
   a. Desain lokasi dan tata letak fasilitas penimbangan;
   b. Spesifikasi teknis alat penimbangan dan system pendukung;
   c. Arsitektur sistem informasi.

(3) Pengujian fungsi dan verifikasi kelayakan operasional penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk memastikan bahwa fasilitas penimbangan memenuhi standar teknis dan laik fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pengoperasian Fasilitas Penimbangan oleh PIHAK KEDUA, sebagai berikut:
   a. Pengoperasian Fasilitas Penimbangan oleh PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah diterbitkannya Penetapan Pengoperasian dari Direktur Jenderal;
   b. Dilaksanakan sebagai sarana penyaringan (*screening*) awal kendaraan barang sebelum keluar dari kawasan industri;
   c. Tidak termasuk pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran muatan dan/atau dimensi kendaraan bermotor;
   d. Memerintahkan kendaraan untuk melakukan putar balik jika ditemukenali kendaraan dengan berat muatan melebihi 5% (lima persen) dari jumlah berat yang diizinkan (JBI).

(5) Pelaksanaan pemeliharaan Fasilitas Penimbangan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk menjamin keandalan, keselamatan, dan fungsi Fasilitas Penimbangan.

(6) PIHAK KEDUA menyampaikan data hasil penimbangan secara berkala melalui sistem informasi yang terintegrasi dengan sistem Direktorat Jenderal sesuai mekanisme yang disepakati PARA PIHAK.

(7) PIHAK KESATU melakukan pembinaan dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
MONITORING DAN EVALUASI

(1) PIHAK KESATU melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memastikan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar teknis yang berlaku.

(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Pelaksanaan pengoperasian Fasilitas Penimbangan oleh PIHAK KEDUA;
   b. Pemantauan data hasil penimbangan melalui sistem informasi;
   c. kondisi, fungsi, dan keandalan Fasilitas Penimbangan;
   d. pelaksanaan pemeliharaan Fasilitas Penimbangan; dan
   e. pemenuhan standar teknis dan operasional.

(3) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dapat dilakukan kunjungan lapangan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

(4) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian standar teknis, gangguan sistem atau pelaksanaan tidak sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, PIHAK KESATU menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada PIHAK KEDUA.
(5) PIHAK KEDUA wajib menindaklanjuti rekomendasi perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(6) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam berita acara atau laporan evaluasi yang ditandatangani PARA PIHAK.

PASAL 8
PEMBIAYAAN

(1) Seluruh pembiayaan yang timbul dalam rangka pengadaan dan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pengelolaan sistem informasi fasilitas penimbangan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(2) Fasilitas Penimbangan yang dibangun merupakan milik PIHAK KEDUA dan tidak menjadi Barang Milik Negara (BMN) serta segala risiko atas kerusakan, kehilangan atau kegagalan fungsi menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
(3) PIHAK KESATU tidak memiliki hak kepemilikan, penguasaan, maupun hak pengelolaan atas Fasilitas Penimbangan yang dibangun oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
(4) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, status kepemilikan fasilitas penimbangan tetap berada pada PIHAK KEDUA.

PASAL 9
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat dilakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kerja sama dan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 10
PERSELISIHAN

(1) Apabila terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka penyelesaiannya dilakukan bersama-sama dengan cara musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila dengan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kata sepakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 11
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Apabila terjadi hal-hal yang berada diluar kemampuan PARA PIHAK yang disebabkan karena keadaan memaksa *(force majeure)*, maka dapat dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini, dengan persetujuan PARA PIHAK.
(2) Keadaan memaksa *(force majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang menghambat jalannya pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini yang tidak dapat dibatasi oleh siapapun yang meliputi: peperangan, pemberontakan, kekacauan, huru hara, bencana alam serta bencana non alam yang dinyatakan resmi oleh Pemerintah sehingga PARA PIHAK tidak mampu melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini.
(3) Apabila keadaan memaksa *(force majeure)* berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh pihak yang mengalami keadaan memaksa *(force majeure)* akan melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 12
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dalam hal:
    a. Adanya kesepakatan tertulis PARA PIHAK;
    b. Berakhirnya kewenangan atau perubahan kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; atau
    c. Adanya keadaan lain yang disepakati PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir bukan karena kelalaian PIHAK KEDUA, maka berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tidak menimbulkan tuntutan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 13
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau apabila Perjanjian Kerja Sama ini akan diubah akan diatur kemudian dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.
(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 14
KORESPONDESI

(1) Setiap pemberitahuan atau korespondensi dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Kerja Sama ini, wajib dibuat secara tertulis dan disampaikan melalui surat tercatat atau diserahkan secara langsung, dan dialamatkan ke:

a. PIHAK KESATU
   Tujuan : Direktur Prasarana Transportasi Jalan
   Alamat : Gedung Karya Lantai 10 Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat
   Telepon : (021) 3506138
   Email : ditprashubdat@gmail.com

b. PIHAK KEDUA
   Tujuan : PT Kawasan Berikat Nusantara
   Alamat : Jl. Raya Cakung Cilincing, Tanjung Priok, Jakarta Utara
   Telepon : (021) 4482-0909
   Email : sekper@kbn.co.id

(2) Dalam hal pembatalan atau perubahan alamat berlaku apabila pembatalan/ pemberitahuan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pembatalan/perubahan dilakukan. Dalam hal pemberitahuan mengenai hal tersebut tidak dilakukan, maka segala keterlambatan atas pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di awal Perjanjian Kerja Sama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing untuk PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Dr. IDIS AAN SUHANAN, M.Si.	MUHAMMAD ISRAN

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

DENGAN

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

TENTANG

PELAKSANAAN SURVEI, VERIFIKASI DAN SERTIFIKASI STATUTORIA KAPAL BERBENDERA INDONESIA

Nomor PIHAK PERTAMA :
HK.201/1/1/DJPL/2026
Nomor PIHAK KEDUA :
B.00535/HK.503/KI-26

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (12 – 01 – 2026) bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. **MUHAMMAD MASYHUD,** Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/TPA Tahun 2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dalam jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian Perhubungan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. **R. BENNY SUSANTO**, Direktur Utama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), dalam hal ini

COOPERATION AGREEMENT

BETWEEN

DIRECTORATE GENERAL OF SEA TRANSPORTATION

AND

PT BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

CONCERNING

STATUTORY SURVEY, VERIFICATION AND CERTIFICATION STATUTORY FOR INDONESIAN FLAGGED SHIPS

Number related to FIRST PARTY :
HK.201/1/1/DJPL/2026
Number related to SECOND PARTY :
B.00535/HK.503/KI-26

On this day, Monday, dated Twelve of January Two Thousand Twenty-Six (12 – 01 – 2026), take place in Jakarta, we the undersigned:

I. ***MUHAMMAD MASYHUD****, in his capacity as Director General for Sea Transportation, appointed pursuant to Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 74/TPA of 2025 dated May 6, 2025, concerning the dismissal and appointment to a high-ranking leadership position within the Ministry of Transportation, hereby acting for and on behalf of the Directorate General of Sea Transportation, Ministry of Transportation of the Republic of Indonesia, with its office located at Jalan Medan Merdeka Barat Number 8, Central Jakarta, hereinafter referred to as the* ***FIRST PARTY.***

II. ***R. BENNY SUSANTO****, President Director of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), who is in this*

bertindak untuk dan atas nama PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Biro Klasifikasi Indonesia Nomor 10 tanggal 15 September 2025, yang berkedudukan di Jl. Yos Sudarso Nomor 38-40 Tanjung Priok Jakarta 14320, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

regard is acting for and on behalf of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero), based on the deed of statement of Decision of The Shareholders of the Limited Liability Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia Number DU.212/KP.005/IDS-25 *Dated August 27 2025, having its domicile at Jalan Yos Sudarso Number 38-40, Tanjung Priok, Jakarta 14320, hereinafter referred to as the* ***SECOND PARTY.***

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut:

Hereinafter the ***FIRST PARTY*** *and the* ***SECOND PARTY*** *jointly shall be referred to as the* ***PARTIES****, firstly explained as follows:*

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang transportasi laut;

a. *that the* ***FIRST PARTY*** *is a working unit under and is responsible to the Minister of Transportation, which has the task of organizing the formulation and implementation of policies in the field of sea transportation;*

b. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan instansi Pemerintah yang bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan bahwa kapal-kapal berbendera Indonesia telah memenuhi ketentuan konvensi *International Maritime Organization (IMO)* dan peraturan nasional, termasuk melakukan survei dan sertifikasi statutoria;

b. *that the* ***FIRST PARTY*** *is the government agency that is responsible for taking measures to ensure that the Indonesian flagged ships met the provisions of the Convention of the International Maritime Organization (IMO) and national legislations, including conducting surveys and providing statutory certification;*

c. bahwa berdasarkan resolusi *Maritime Safety Committee* 349 (92) yang telah diberlakukan melalui Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.008/72/7/DJPL-15 tentang Pemberlakuan Kode Internasional Untuk Organisasi Yang Diakui (*Code for Recognized Organizations* (*RO CODE*)), pelaksanaan survei dan sertifikasi dapat didelegasikan kepada organisasi yang ditunjuk (*Recognized Organization/RO*);

c. *that based on Maritime Safety Committee resolution 349 (92) which has been implemented through the Decree of the Director General of Sea Transportation Number UM.008/72/7/DJPL-15 concerning the Implementation of the International Code for Recognized Organizations (RO CODE), the implementation of surveys and certification can be delegated to designated organizations (Recognized Organizations/RO);*

d. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas dibidang klasifikasi kapal niaga berbendera Indonesia dan kapal berbendera asing, serta badan klasifikasi yang diakui sebagai organisasi yang ditunjuk (*Recognized Organization/RO*);

d. *The **SECOND PARTY** is a State-Owned Enterprise that has duties in the field of classification of Indonesian-flagged merchant ships and foreign-flagged vessels, as well as a classification body that is recognized as an appointed organization (Recognized Organization/RO);*

e. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 112 Tahun 2021 tentang Penunjukan kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk melaksanakan Survei dan Sertifikasi Statutoria pada Kapal Berbendera Indonesia;

e. *that based on the Decree of the Minister of Transportation Number KM 112 of 2021 concerning the Appointment of PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to carry out Statutory Surveys and Certification on Indonesian-Flagged ships;*

f. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Keselamatan dan Keamanan Pelayaran pada Transportasi Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Direktur Jenderal Perhubungan Laut menyelenggarakan tugas dan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran pada transportasi sungai, danau dan penyeberangan;

f. *that based on the Instruction of the Minister of Transportation of the Republic of Indonesia Number IM 3 of 2025 concerning the Implementation of Duties and Functions of Maritime Safety and Security in River, Lake, and Ferry Transportation, the Director General of Sea Transportation carries out the duties and functions of maritime safety and security in river, lake, and ferry transportation;*

g. bahwa untuk melaksanakan ketentuan PM 51 Tahun 2021 tentang Prosedur Dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan pada Pasal 18 yang menyatakan bahwa pelaksanaan verifikasi keamanan kapal yang dilaksanakan oleh Pihak Kedua dituangkan dalam Nota Kesepahaman / Perjanjian Kerja Sama.

g. *That to implement the provisions of Ministerial Regulation No. 51 of 2021 concerning Procedures and Implementation Procedures for Verification of Ship Security Management and Port Facility, as stated in Article 18, the implementation of ship security verification conducted by the Second Party is set forth in a Memorandum of Understanding / Cooperation Agreement.*

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka Pelaksanaan Survei, Verifikasi dan Sertifikasi Statutori Kapal Berbendera Indonesia (untuk selanjutnya disebut dengan **PERJANJIAN**), dengan ketentuan sebagai berikut:

Based on the foregoing, the PARTIES agree to enter into a cooperation for the purpose of the Implementation of Surveys, Verification, and Statutory Certification of Indonesian-Flagged Vessels (hereinafter referred to as the "AGREEMENT"), under the following terms and conditions:

	Pasal 1 **DASAR HUKUM**		***Article 1*** ***LEGAL REFERENCES***
1.	Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7142);	*1.*	*Act Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 70 of 2003, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4297), as amended several times most recently by Law No. 1 of 2025 concerning the Third Amendment to Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 2025 Number 25, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7097);*
2.	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);	*2.*	*Act Number 17 of 2008 concerning Shipping (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 64, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4849), as last amended several times by Law Number 66 of 2024 concerning the Third Amendment to Law Number 17 of 2008 concerning Shipping (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 252, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7003);*
3.	Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);	*3.*	*Government Regulation Number 51 Year 2002 on Shipping (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2002 Number 95, Supplement to State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4227);*
4.	Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan	*4.*	*Government Regulation Number 15 Year 2016 on Type and Tariff on Non-Tax Revenue of the State applicable at Ministry of Transportation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 102, Supplement to State*

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230 Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia nomor 6563);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6643);

7. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian *Holding* Operasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 33);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2025 tentang Tata Cara Penetapan Tarif, Pengelolaan, dan Penyelesaian Keberatan, Keringanan, dan Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 156);

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013 tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2013

Gazette of the Republic of Indonesia Number 5884);

5. *Government Regulation Number 58 of 2020 concerning the Management of Non-Tax State Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia 2020 Number 230 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6563);*

6. *Government Regulation Number 31 of 2021 concerning the Implementation of the Shipping Sector (State Gazette of the Republic of Indonesia 2021 Number 41 Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6643);*

7. *Presidential Regulation Number 173 Year 2024 concerning the Ministry of Transportation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 369);*

8. *Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 15 of 2025 concerning the Addition of State Capital Participation of the Republic of Indonesia into the Share Capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia for the Establishment of an Operational Holding (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 33);*

9. *Government Regulation Number of the Republic of Indonesia 44 of 2025 concerning Procedures for Determining Tariffs, Management, and Settlement of Objections, Relief, and Return of Non-Tax State Revenue (State Gazette of the Republic of Indonesia 2025 Number 156);*

10. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 7 of 2013 concerning the Classification Obligation for Indonesian-Flagged Ships at Classification Bodies as amended by the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 61 of 2014 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 7 of*

tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Badan Klasifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1818);

2013 concerning the Classification Obligation for Indonesian-Flagged Ships at Classification Bodies (State Gazette of the Republic of Indonesia 2014 Number 1818);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 968);

11. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 77 of 2016 concerning Guidelines for the Implementation of Types and Tariffs of Non-Tax State Revenue applicable to the Directorate General of Sea Transportation (State Gazette of the Republic of Indonesia 2016 Number 968);*

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 51 Tahun 2021 tentang Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 693);

12. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 51 Year 2021 concerning Security Management Verification for Ship and Port Facility (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 693);*

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 245);

13. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 4 Year 2025 on the Organization and Working Procedure of the Ministry of Transportation (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 245);*

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 33 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Amandemen SOLAS 1974 tentang Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan;

14. *Decision of Minister of Transportation Number 33 Year 2003 concerning the Entry into Force of the 1974 SOLAS Amendment on the Safeguarding of Ships and Port Facilities;*

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 3 Tahun 2004 tentang Penunjukan Direktur Jenderal Perhubungan Laut sebagai *Designated Authority* Pelaksanaan Pengamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (*International Ships and Port Facility Security/ISPS Code);*

15. *Decision of Minister of Transportation Number 3 Year 2004 on the Appointment of the Director General of Sea Transportation as Designated Authority for the Implementation of the International Ships and Port Facility Security (ISPS Code);*

16. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 112 Tahun 2021 tentang Penunjukan Kepada PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) untuk Melaksanakan Survei dan Sertifikasi Statutoria pada Kapal Berbendera Indonesia;

16. *Decision of Minister of Transportation Number 112 Year 2021 regarding The Appointment of PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) to Conduct Statutory Survey and Certification on Indonesia Flagged Ships;*

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 879);

18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1004);

19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2016 tentang Garis Muat dan Pemuatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 524);

20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 134 Tahun 2016 tentang Manajemen Keamanan Kapal dan Fasilitas Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1638);

21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2021 tentang Stabilitas Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 750);

22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemeriksaan, Pengujian dan Sertifikasi Keselamatan Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 697);

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2022 tentang Kelaiklautan Kapal Kecepatan Tinggi Berbendera Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68);

17. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 45 of 2012 concerning Ship Safety Management (State Gazette of the Republic of Indonesia 2012 Number 879);*

18. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 29 of 2014 concerning Prevention of Maritime Environmental Pollution (State Gazette of the Republic of Indonesia 2014 Number 1115) as amended by the Regulation of the Minister of Transportation Number PM 24 of 2022 concerning Amendments to Regulation of the Minister of Transportation Number PM 29 of 2014 concerning Prevention of Maritime Environmental Pollution (State Gazette of the Republic of Indonesia 2022 Number 1004);*

19. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 39 of 2016 concerning Load Lines and Loading (State Gazette of the Republic of Indonesia 2016 Number 524);*

20. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 134 of 2016 concerning Ship and Port Facility Security Management (State Gazette of the Republic of Indonesia 2016 Number 1638);*

21. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 44 of 2021 concerning Ship Stability (State Gazette of the Republic of Indonesia 2021 Number 750);*

22. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 57 of 2021 concerning Procedures for Inspection, Testing and Certification of Ship Safety (State Gazette of the Republic of Indonesia 2021 Number 697);*

23. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 12 of 2022 concerning the Seaworthiness of High-Speed Craft the Indonesian Flag (State Gazette of the Republic of Indonesia 2022 Number 68);*

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2023 Tentang Pelaksanaan Konvensi Internasional untuk Keselamatan Jiwa di Laut Beserta Amandemennya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 346);

25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 7 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Sistem Pemeriksaan dan Sertifikasi pada Kapal Berbendera Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 202);

26. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM. 008/72/7/DJPL-15 tentang Pemberlakuan Kode Internasional Untuk Organisasi Yang Diakui (*Code for Recognized Organizations* (RO *Code*).

24. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 11 of 2023 concerning the Implementation of the International Convention for the Safety of Life at Sea and its Amendments (State Gazette of the Republic of Indonesia 2023 Number 346);*

25. *Regulation of the Minister of Transportation Number PM 7 of 2024 concerning Harmonization of Inspection and Certification Systems for Indonesian Flagged Vessels (State Gazette of the Republic of Indonesia 2024 Number 202);*

26. *Decision of the Director General of Sea Transportation Number UM. 008/72/7/DJPL-15 concerning the Application of International Code for Recognized Organizations (RO Code).*

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud dari **PERJANJIAN** ini sebagai pembaharuan kerja sama dalam rangka pendelegasian kewenangan pelaksanaan persetujuan, survei, verifikasi dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia;

(2) Tujuan dari **PERJANJIAN** ini meningkatkan pemenuhan terhadap seluruh aspek kelaiklautan bagi kapal berbendera Indonesia.

Article 2
PURPOSE AND OBJECTIVES

*(1) The purpose of this **AGREEMENT** is to renew cooperation in the context of delegating authority for the implementation of approval, survey, verification and statutory certification of Indonesian-flagged ships;*

*(2) The purpose of this **AGREEMENT** is to improve compliance with all aspects of seaworthiness for Indonesian-flagged vessels.*

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **PERJANJIAN** ini adalah:

a. Pendelegasian kewenangan untuk melaksanakan persetujuan, survei, verifikasi dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia yang telah diklasifikasi sesuai dengan Lampiran

Article 3
SCOPE

*The scope of this **AGREEMENT** is:*

*a. The delegation of authority to conduct approval, survey, verification and statutory certification of Indonesian-flagged vessels that have been classified in accordance with Annex I and Annex II is an integral part of this **AGREEMENT**;*

I dan Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN** ini;

b. Pelaksanaan Kewajiban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

c. Pelaksanaan Program *Oversight*; dan

d. Pelaksanaan *Periodical Inspection.*

b. *Implementation of Non-Tax State Revenue (PNBP) Obligation;*

c. *Implementation of Oversight Programme; and*

d. *Implementation of Periodical Inspection.*

Pasal 4
PELAKSANAAN

(1) Pendelegasian kewenangan statutoria untuk melaksanakan persetujuan, survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** atas nama Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II dari **PERJANJIAN** ini;

(2) Pelaksanakan persetujuan, survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia harus mengacu pada ketentuan-ketentuan dari Konvensi *IMO* yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia, dan peraturan nasional;

(3) **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** setiap informasi mengenai perubahan, pembaruan, atau pemberlakuan instrumen internasional serta konvensi IMO yang telah atau akan diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia;

(4) Pelaksanakan persetujuan, survei, verifikasi dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia dilakukan **PIHAK KEDUA** hanya terhadap kapal – kapal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan Lampiran II dari **PERJANJIAN** ini;

(5) **PIHAK PERTAMA** dapat menggunakan kewenanganannya dalam pelaksanaan

Article 4
IMPLEMENTATION

*(1) The delegation of statutory authority to conduct approval, survey, verification and statutory certification of Indonesian-flagged ships is carried out by the **SECOND PARTY** on behalf of the Government of the Republic of Indonesia, in this case represented by the Ministry of Transportation as stipulated in in Annex I and Annex II of this **AGREEMENT**;*

(2) The implementation of approval, survey, verification and statutory certification of Indonesian-flagged ships, shall refer to the provisions of the IMO Convention which has been ratified by the Indonesian Government, and national regulations;

*(3) The **SECOND PARTY** shall provide the **FIRST PARTY** with any information concerning amendments, updates, or entry into force of international instruments and IMO conventions that have been or will be ratified by the Government of Indonesia;*

*(4) The Implementation of approval, survey, verification and statutory certification of the Indonesian-flagged ships is carried out by the **SECOND PARTY** only for vessels as referred to in Annex I and Annex II of this **AGREEMENT;***

*(5) The **FIRST PARTY** shall use its authority in implementing the approval, survey, verification*

persetujuan, survei, verifikasi, dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia yang telah didelegasikan kepada **PIHAK KEDUA**, guna menjamin efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pemerintahan, dengan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA.**

*and statutory certification of Indonesian-flagged ships that have been delegated to the **SECOND PARTY**, to ensure effectiveness and efficiencies of conducting government duties, with notification to the **SECOND PARTY**.*

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** untuk melaksanakan **PERJANJIAN** ini adalah sebagai berikut:

(1) **PIHAK PERTAMA** berhak:

a. Mendapatkan akses untuk semua data, prosedur, rencana dan dokumen termasuk laporan pemeriksaan sebagai dasar penerbitan atau pengesahan sertifikat statutoria pada kapal berbendera Indonesia oleh **PIHAK KEDUA**;

b. Menerima laporan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan pelaksanaan pendelegasian sebagaimana diatur dalam pasal 16;

c. Menerima pembayaran PNBP terhadap pemeriksaan/survei, verifikasi, penerbitan atau pengesahan sertifikat statutoria kapal berbendera Indonesia;

d. Melakukan monitoring dan verifikasi atas penyetoran PNBP terhadap penerbitan atau pengesahan sertifikat statutoria secara berkala;

e. Mendapatkan dukungan secara aktif dari **PIHAK KEDUA** terhadap kelancaran pelaksanaan program pengawasan (*oversight program*).

Article 5

RIGHTS AND OBLIGATIONS

*The Rights and Obligations of the **PARTIES** to implement this **AGREEMENT** are as follows:*

*(1) The **FIRST PARTY** is entitled to:*

*a. Getting access to all data, procedures, plans and documents including inspection reports as the basis for the issuance of a certificate or legalization statutory certificates on Indonesian -flagged ships by the **SECOND PARTY**;*

*b. Receiving a written report from the **SECOND PARTY** regarding the implementation of delegation as regulated in Article 16;*

c. Receive payment of non-revenue tax for inspection/survey, verification, issuance or ratification of statutory certificates for Indonesian-flagged ships;

d. Conduct monitoring and verification of non-revenue tax deposits against the issuance or ratification of statutory certificates periodically;

*e. Getting active support from the **SECOND PARTY** for the implementation of the oversight program.*

(2) **PIHAK PERTAMA** wajib:

a. Menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KEDUA** apabila dalam pelaksanaan tugas pendelegasian terdapat hal-hal yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan *IMO* dan peraturan nasional yang berlaku;

b. Memberikan informasi, peraturan, interpretasi maupun dokumen terkait kebijakan pelaksanaan tugas pendelegasian kepada **PIHAK KEDUA**;

c. Melaporkan kepada *IMO* terkait pendelegasian beberapa kewenangan yang telah diberikan dan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** termasuk pembebasan yang diberikan, dan pemutakhiran pendelegasian kepada **PIHAK KEDUA** pada situs *IMO GISIS*;

d. Memberikan kewenangan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan inspeksi dan survei serta meminta perbaikan terhadap kapal oleh pemilik atau operator kapal, apabila diminta oleh Pejabat Pemeriksa Kapal Asing.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:

a. Mendapatkan akses informasi, peraturan, interpretasi maupun dokumen terkait kebijakan pelaksanaan tugas pendelegasian dari **PIHAK PERTAMA**;

b. Melakukan pemeriksaan dalam rangka persetujuan, survei, verifikasi dan sertifikasi statutoria pada kapal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, dan Lampiran II dari **PERJANJIAN** ini;

c. Memberikan sanksi administratif kepada pemilik kapal atas ketidaksesuaian pemenuhan persyaratan sertifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku;

*(2) The **FIRST PARTY** is obligated to:*

*a. Give notice to the **SECOND PARTY** should there are things in the implementation of delegation that is considered incompatible with the prevailing provisions of the IMO regulations and national legislation;*

*b. Provide information, rules, interpretation and the documents related to the policy of the implementation of the delegated tasks to the **SECOND PARTY**;*

*c. Reporting to IMO regarding the delegation of several authorities that have been granted and implemented by the **SECOND PARTY** including the exemptions granted, and updating the delegation to the **SECOND PARTY** on the IMO GISIS website;*

*d. Give the authority to **SECOND PARTY** to request repairs for the ship, and carry out inspections and surveys if requested by the Port State Control Officers.*

(3) *The **SECOND PARTY** is entitled to:*

*a. Getting the access to the information, rules, interpretation and documents related to the policy of the implementation of the delegated tasks from **FIRST PARTY**;*

*b. Conduct inspections for the purpose of approval, survey, verification and statutory certification of ships as referred to in Annex I and Annex II of this **AGREEMENT**;*

c. Giving administrative sanction to ship owner for non compliance of certification requirements in accordance to the provisions of the prevailing laws and regulations;

d. Mendapatkan dukungan sesuai dengan kewenangan **PIHAK PERTAMA** jika hasil survei dan verifikasi untuk sertifikasi statutoria yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dan pihak lain yang bertindak atas nama **PIHAK KEDUA** atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dianggap meragukan, sepanjang survei tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

d. *Getting support in accordance with the authority of the **FIRST PARTY** if the results of the survey and verification for statutory certification implemented by the **SECOND PARTY** and other parties acting on behalf of the **SECOND PARTY** with the approval of the FIRST PARTY are considered doubtful, as long as the survey has been conducted in accordance with applicable provisions;*

e. Menentukan pengenaan tarif jasa persetujuan, survei, verifikasi dan sertifikasi statutoria kapal pada kapal berbendera Indonesia berdasarkan jenis struktur dan golongan tarif ke ekonomian yang wajar setelah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** serta melaporkannya kepada **PIHAK PERTAMA**;

e. *Establishing the imposition of tariffs for approval, survey, verification and statutory certification services on Indonesian-flagged ships based on the type of structure and reasonable economic tariff group after obtaining approval from the **FIRST PARTY** and reporting it to the **FIRST PARTY**;*

f. Mendapatkan informasi terkait skema pengenaan tarif jasa persetujuan, survei, verifikasi dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia berdasarkan jenis struktur dan golongan tarif yang akan ditetapkan oleh Pemerintah.

f. *Obtain information regarding the tariff scheme for approval services, surveys, verification, and statutory certification of Indonesian-flagged vessels based on the type of structure and tariff classification to be determined by the Government.*

(4) **PIHAK KEDUA** wajib:

(4) *The **SECOND PARTY** is obligated to:*

a. Memberikan pelayanan persetujuan, survei, verifikasi dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan *IMO* dan ketentuan nasional yang berlaku;

a. *Providing approval, survey, verification and statutory certification services for Indonesian-flagged vessels in accordance with IMO conventions and national legislation;*

b. Memberikan akses untuk semua rencana dokumen termasuk laporan pemeriksaan sebagai dasar penerbitan atau pengesahan sertifikat oleh **PIHAK KEDUA**;

b. *Provide access to all planned documents including inspection reports as the basis for issuing or validating certificates by the **SECOND PARTY;***

c. Ikut serta memberikan informasi atas perkembangan atau perubahan peraturan internasional terkait tugas pendelegasian;

c. *Participate in providing information on developments or changes in international regulations related to delegation tasks;*

d. Melaporkan pelaksanaan tugas pendelegasian kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala sebagaimana diatur dalam pasal 16;

e. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** sesegera mungkin terkait kendala yang ada atas pemenuhan persyaratan sertifikasi;

f. Bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan dari hasil pelaksanaan tugas pendelegasian, termasuk pada penahanan kapal (*detention*) melalui kerjasama dengan *Port State Control Officer* (PSCO) di pelabuhan luar negeri;

g. Menghindari konflik kepentingan baik dengan **PIHAK PERTAMA** maupun pihak lain dalam pelaksanaan tugas pendelegasian;

h. Menyetorkan tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap pemeriksaan dan penerbitan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

i. Memberikan dukungan secara aktif terhadap peran **PIHAK PERTAMA** pada pertemuan internasional dengan menyampaikan masukan, usulan, pandangan atas agenda sidang internasional pada rapat pembahasan maupun penyampaian secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA;**

j. Memberikan dukungan secara aktif terhadap kelancaran pelaksanaan program pengawasan *(oversight programe)*;

k. Mempunyai sertifikasi Manajemen Mutu yang dilaksanakan oleh kelompok audit independen yang mewakili kepentingan Pemerintah atau IMO;

*d. Reporting the implementation of delegated tasks to the **FIRST PARTY** regularly based on the requirements of article 16;*

*e. Report to **FIRST PARTY** regarding obstacles that may occur on the requirements compliance for certification;*

f. Be responsible for the consequences result of the implementation of delegated tasks, including but not limited to detention of ships through cooperation with Port State Control Officers (PSCO) of foreign ports;

*g. Avoiding any conflict of interest either with the **FIRST PARTY** and other parties in the implementation of delegated tasks;*

h. Depositing Non-Tax State Revenue bills for the inspection and issuance of statutory certification of Indonesian-flagged ships in accordance with the provisions of laws and regulations;

*i. Actively participating in **FIRST PARTY's** role on international meeting by delivering inputs, proposal, views regarding international meeting agendas during preparation meeting and in written format to **FIRST PARTY**;*

j. Provide active support for the implementation of the oversight program;

k. Have a Quality Management certification carried out by an independent audit group representing the interests of the Government or IMO;

l. Melaporkan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait dengan pengenaan tarif jasa persetujuan, survei, verifikasi dan sertifikasi statutoria kapal pada kapal berbendera Indonesia yang diberlakukan kepada pengguna jasa.

(5) **PARA PIHAK** berkomitmen untuk membangun sistem manajemen informasi data yang terintegrasi.

Pasal 6
PENGECUALIAN, PEMBEBASAN, DAN KESETARAAN

(1) Pengecualian, pembebasan, dan kesetaraan terhadap persyaratan – persyaratan ketentuan yang berlaku adalah hak istimewa **PIHAK PERTAMA**, dan sepanjang diperlukan **PIHAK KEDUA** akan memberikan masukan dalam menetapkan ketentuan tersebut.

(2) Dalam hal dimana untuk sementara waktu, dalam keadaan tertentu persyaratan-persyaratan dari instrumen yang berlaku tidak dapat dipenuhi oleh pengguna jasa, maka surveyor **PIHAK KEDUA** dapat menentukan ukuran-ukuran setara atau persyaratan pengganti yang memungkinkan untuk mengijinkan kapal meneruskan pelayaran ke pelabuhan dimana perbaikan permanen atau pergantian peralatan dapat disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** setelah dianggap memadai melalui pengujian.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **PERJANJIAN** ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.

*l. To report to the **FIRST PARTY** regarding the imposition of tariffs for approval services, surveys, verification, and statutory certification of Indonesian-flagged vessels as applied to service users..*

*(5) **THE PARTIES** are committed to building an integrated data information management system.*

Article 6
EXCEPTION, EXEMPTION, AND EQUIVALENT

*(1) Exceptions, exemptions, and equivalent of the applicable provision of requirements is the privilege of the **FIRST PARTY**, and to the extent the same is required then the **SECOND PARTY** will provide input in determining such provision.*

*(2) In the case for the time being, in certain circumstances where the requirements of the applicable instruments cannot be met by the service user, the surveyor of the **SECOND PARTY** can determine the equivalent size or the replacement terms that allows to permit the ships to continue sailing to the port where a permanent repair or replacement of equipment can be approved by the FIRST PARTY after being deemed adequate through testing.*

Article 7
FINANCING

*Expenses incurred as a result of the implementation of this **AGREEMENT** shall be borne to the budgets of the **PARTIES** in accordance with each responsibility and tasks.*

Pasal 8
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

(1) Biaya yang dipungut oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pelayanan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia dibebankan Pendapatan Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(2) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pelaporan atas seluruh kegiatan dan data yang timbul berdasarkan **PERJANJIAN** ini, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

(3) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Nota Tagih disertai Kode Billing kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** melakukan penyetoran berdasarkan Kode Billing ke Kas Negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;

(4) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan verifikasi ulang setiap 3 (tiga) bulan untuk meneliti kesesuaian pelaporan kegiatan dan data yang disampaikan untuk diperhitungkan dalam penyesuaian pembayaran PNBP yang dituangkan dalam Berita Acara Monitoring dan Verifikasi;

(5) **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Nota Tagih disertai Kode Billing kepada **PIHAK KEDUA** paling lama 2 (dua) hari kerja sejak ditandatanganinya Berita Acara Monitoring dan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** melakukan penyetoran berdasarkan Kode Billing ke Kas Negara dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender;

Article 8
NON-TAX REVENUE

*(1) Fees imposed by the **SECOND PARTY** for the service of statutory certification, including the verification and statutory certification for Indonesian-flagged ships, shall be credited to the State Revenue as Non-Tax State Revenue (PNBP) in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations;*

*(2) The **SECOND PARTY** is obliged to report on all activities, data and financial obligations arising based on this **AGREEMENT**, no later than the 10th of each month and the **PARTIES** carry out monitoring and verification every 3 (three) months which is stated in the Minutes of meeting;*

*(3) The **FIRST PARTY** shall issue an Invoice accompanied by a Billing Code to the **SECOND PARTY** no later than five (5) working days from the receipt of the report as referred to in paragraph (2), and thereafter the **SECOND PARTY** shall make the payment based on the Billing Code to the State Treasury within a maximum period of seven (7) calendar days;*

*(4) The **PARTIES** shall conduct monitoring and re-verification every three (3) months to examine the conformity of activity reports and submitted data to be taken into account for the adjustment of Non-Tax State Revenue (PNBP) payments, as set forth in the Minutes of Monitoring and Verification*

*(5) The **FIRST PARTY** shall issue a Billing Note accompanied by a Billing Code to the SECOND PARTY no later than 5 (five) working days from the date of signing of the Monitoring and Verification Minutes, and thereafter the SECOND PARTY shall make the payment to the State Treasury based on the Billing Code within no later than 7 (seven) calendar days;*

(6) Bukti Penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5) berlaku sebagai bukti telah dilakukannya pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**;

(7) Dalam hal pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak melewati masa berlaku Kode Billing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** akan dikenakan denda keterlambatan dan dicatat sebagai piutang dalam laporan keuangan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(8) Dalam hal pelaksanaan PNBP, **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Mitra Instansi Pengelola PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

*(6) The Proof of Deposit as referred to in paragraph (3) shall serve as proof that payment has been made by the **SECOND PARTY** to the **FIRST PARTY**;*

*(7) In the case of late payment of Non-Tax State Revenue, the **SECOND PARTY** shall be subject to a late penalty, which shall be recorded as receivables in the financial statements of the **FIRST PARTY** in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations.*

(8) In the implementation of Non-Tax State Revenue (PNBP), the FIRST PARTY may appoint the SECOND PARTY as a Partner Institution for the Management of Non-Tax State Revenue in accordance with the prevailing laws and regulations.

Pasal 9
JANGKA WAKTU

(1) **PERJANJIAN** ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **PERJANJIAN** ini, dan dapat dilakukan pembaharuan **PERJANJIAN**;

(2) Pembaharuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan mempertimbangkan terlebih dahulu hasil dari program pengawasan *(oversight program)* oleh **PIHAK PERTAMA**;

(3) Dalam hal hasil pengawasan oleh **PIHAK PERTAMA** masih terdapat temuan yang belum dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA**, maka sebelum pembaharuan **PERJANJIAN**, **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu mengajukan permohonan perpanjangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya **PERJANJIAN** ini, yang dituangkan dalam

Article 9
TIME PERIOD

*(1) This **AGREEMENT** shall be valid for a period of 2 (two) years as of the date of its signing, and may be subject to renewal;*

*(2) The renewal as referred to in paragraph (1) may be carried out by taking into consideration the results of the oversight program conducted by the **FIRST PARTY**;*

*(3) In the case of the oversight results conducted by the **FIRST PARTY** there are still findings that have not been fulfilled by the **SECOND PARTY**, prior to the renewal of this **AGREEMENT**, the **SECOND PARTY** shall submit a request for extension no later than 30 (thirty) days before the expiry of this **AGREEMENT**, which shall be set forth in an*

addendum **PERJANJIAN** dalam rangka menyelesaikan hasil program pengawasan *(oversight program)*;

(4) Selama masa perpanjangan **PERJANJIAN**, **PIHAK KEDUA** tetap dapat melaksanakan persetujuan, survei, verifikasi dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia.

*addendum to this **AGREEMENT** for the purpose of completing the results of the oversight program;*

*(4) During the extension period of the **AGREEMENT**, the **SECOND PARTY** shall continue to carry out approvals, surveys, verifications and statutory certification of Indonesian-flagged ships.*

Pasal 10
PENGAWASAN (OVERSIGHT)

(1) **PIHAK PERTAMA** melakukan pengawasan dalam bentuk audit, monitoring, evaluasi dan reviu secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali;

(2) **PIHAK PERTAMA** melakukan inspeksi periodik pada kapal yang dilaksanakan 2 (dua) kali dalam periode 5 (lima) tahun masa berlaku sertifikat kapal.

Article 10
OVERSIGHT

*(1) The **FIRST PARTY** conducts administrative audit by audit, monitoring, evaluation and review, every 6 (Six) months;*

*(2) The **FIRST PARTY** carries out periodic inspections on the ship which are carried out 2 (two) times in a 5 (five) year period of validity of the ship's certificate.*

Pasal 11
KERAHASIAAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala data dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini adalah bersifat rahasia serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain yang tidak berkepentingan selama dan setelah **PERJANJIAN** ini berakhir;

(2) Pasal ini tidak berlaku terhadap informasi rahasia antara lain:
   a. Pada saat pengungkapan atau setelahnya, telah menjadi bagian dari informasi umum atau suatu literatur yang bukan merupakan akibat dari pelanggaran terhadap **PERJANJIAN** ini;
   b. Sudah dimiliki **PIHAK** yang menerima informasi rahasia tersebut sebelum informasi tersebut diterima oleh **PIHAK**

Article 11
CONFIDENTIALITY

*(1) **THE PARTIES** agree and consent that all data and information relating to the implementation of this **AGREEMENT** is confidential and may not be disclosed to other parties who are not concerned during and after the expiry of this **AGREEMENT**;*

(2) This article does not apply to confidential information, among other that:
   *a. At the time of disclosure or thereafter, have become part of public information or a piece of literature that is not a result of a violation of this **AGREEMENT**;*
   *b. Already owned by **PARTY** who receive such confidential information before the same information is received by the other*

lainnya dan **PIHAK** yang mengungkapkan informasi tersebut tidak berada dalam suatu kewajiban kerahasiaan;

PARTY *and a* ***PARTY*** *that disclosing such information is not in an obligation of confidentiality;*

c. Didapatkan dari pihak lain (selain dari pihak yang mengungkapkan) yang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan informasi tersebut dan sedang tidak terikat kewajiban kerahasiaan dengan pihak yang mengungkapkan informasi tersebut;

c. Obtained from other parties (other than the disclosing party) who has the freedom to disclose such information and is not bound by the confidentiality obligations to the party that disclosing such information;

d. Dikembangkan secara independen oleh pihak penerima informasi tanpa adanya ketergantungan pada informasi rahasia yang telah diungkapkan oleh pihak pengungkap;

d. independently developed by the party that receive the information without dependence on the confidential information that has been disclosed by the disclosing;

e. Diwajibkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum yang dikeluarkan oleh peradilan, badan legislatif atau administratif atau Institusi Pemerintahan yang terkait;

e. Required to be disclosed by law as stipulated by the judicial, legislative or administrative body or the relevant government institution;

f. Diungkapkan kepada Institusi Pemerintahan yang terkait atau badan lainnya yang memiliki kewenangan sehubungan dengan upaya untuk mendapatkan setiap perizinan dan persetujuan yang diperlukan berdasarkan **PERJANJIAN** ini;

f. disclosed to the relevant government institution or other entity that has the authority in connection with efforts to obtain any permits and approvals required by this ***AGREEMENT****;*

g. Diungkapkan kepada penasihat profesional atau konsultan masing-masing **PIHAK**;

g. Disclosed to the professional adviser or concultant of each ***PARTY****;*

h. Diungkapkan sesuai dengan perjanjian transparansi informasi dimana masing-masing **PIHAK** terikat kepadanya.

h. Disclosed as transparency information in accordance with the agreement in which each ***PARTY*** *bound to it.*

Pasal 12
SURVEYOR DAN AUDITOR

Article 12
SURVEYOR AND AUDITOR

(1) Survei dan audit harus dilaksanakan oleh surveyor dan auditor yang bekerja pada **PIHAK KEDUA**;

(1) Survey and audit should be carried out by a surveyor and auditor who employed by the ***SECOND PARTY****;*

(2) Dalam rangka penerbitan sertifikasi statutoria manajemen keamanan kapal, pelaksanaan verifikasi yang dilaksanakan oleh Auditor pada **PIHAK KEDUA** dengan didampingi oleh Auditor ISPS Code pada **PIHAK PERTAMA**;

(3) Pada kondisi tertentu, dalam hal surveyor dan/atau auditor **PIHAK KEDUA** tidak memungkinkan melakukan survei atau audit sertifikasi statutoria kapal-kapal berbendera Indonesia, **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan surveyor dari Badan Usaha dan/atau organisasi lain sepanjang mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;

(4) Pada kondisi tertentu dimana kapal berada di luar negeri dan tidak terjangkau lokasinya oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk badan klasifikasi internasional di sekitar lokasi tersebut untuk melaksanakan survei atau audit statutoria kapal berbendera Indonesia;

(5) Terkait dengan kegiatan yang hasilnya digunakan sebagai dasar penerbitan sertifikat statutoria, **PIHAK KEDUA** dapat menggunakan jasa pihak lain yang tidak terbatas pada penguji ketebalan pelat dan penyelam untuk survei bawah air, dalam rangka penerbitan sertifikat, setelah mendapat persetujuan **PIHAK PERTAMA**;

(6) Kebenaran hasil survei yang dilakukan oleh surveyor dari pihak lain yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) merupakan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.

*(2) In the context of implementing statutory certification in the field of ship safety, the verification carried out by the Auditor on the **SECOND PARTY** shall be accompanied by an ISPS Code Auditor from the **FIRST PARTY**;*

*(3) In certain circumstances, in which case **SECOND PARTY's** surveyor and/or auditor is unable to conduct a survey or audit of the statutory certification of Indonesian-flagged vessels, the **SECOND PARTY** may use a surveyor from a Business Entity and/or other organization that has a bilateral agreement with the **SECOND PARTY** as long as it obtains approval from the **FIRST PARTY**;*

*(4) In certain circumstances where the Ships is located abroad and unreachable by **SECOND PARTY**, **FIRST PARTY** may appoint international classification society nearby the ships location to conduct statutory survey or audit of Indonesian flagged ships;*

*(5) Regarding the activity whose result is used for consideration in issuing statutory certificates, the **SECOND PARTY** may use the services of other parties, not limited to plate thickness testers and divers for underwater surveys, to support the certificate issuance, after having approval from **FIRST PARTY**;*

*(6) The validity of the results of the survey conducted by surveyors from other parties that are used by the **SECOND PARTY** as mentioned in paragraph (2), paragraph (3) and paragraph (4) is the full responsibility of the **SECOND PARTY**.*

Pasal 13
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE)*

(1) Keadaan Kahar (*Force Majeure)* adalah segala keadaan atau peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan **PARA PIHAK**, seperti bencana alam, sabotase, pemogokan, huru-hara, pandemi / wabah, kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, berdasarkan Keputusan Pemerintah atau instansi yang berwenang atau keadaan kerusakan jaringan listrik, gangguan dan/atau kerusakan jaringan dan sistem (*hardware/software*) yang digunakan oleh **PARA PIHAK** yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya **PERJANJIAN** ini;

(2) Dalam hal terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure)* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak dapat dilakukannya pemeriksaan atau audit secara langsung, maka **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan pemeriksaan atau audit dimaksud secara jarak jauh (*Remote Survey*) dengan tetap memastikan pemenuhan persyaratan. Hasil pemeriksaan dan audit secara jarak jauh (*Remote Survey*) selanjutnya agar dilaporkan kepada **PIHAK PERTAMA**;

(3) Setiap kejadian yang bersifat keadaan kahar (*Force Majeure)* harus diberitahukan kepada **PARA PIHAK** / unit pelaksana teknis / pemilik kapal / operator paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure)* dengan surat pemberitahuan yang disertai dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;

(4) Tidak adanya pemberitahuan hingga lewatnya waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengakibatkan **PARA PIHAK** / unit pelaksana teknis / pemilik kapal / operator yang tidak mengalami peristiwa keadaan kahar (*Force Majeure)* berhak

Article 13
FORCE MAJEURE

*(1) Force Majeure is any condition or event that occurs beyond the control of the **PARTIES**, such as natural disasters, sabotage, strikes, riots, pandemics/epidemics, fires, floods, earthquakes, wars, based on Government Decisions or authorized agencies or conditions of damage to the electricity network, disruptions and/or damage to the network and systems (hardware/software) used by the **PARTIES** that directly or indirectly hinder the implementation of this **AGREEMENT**.*

*(2) In the event of a force majeure event as referred to in paragraph (1) which results in the inability to carry out an inspection or audit directly, the **SECOND PARTY** may carry out the inspection or audit remotely (Remote Survey) while still ensuring that the requirements are met. The results of the remote inspection and audit (Remote Survey) must then be reported to the **FIRST PARTY**;*

*(3) Any incident of a force majeure must be notified to the **PARTIES** / technical implementing unit / ship owner / operator no later than 14 (fourteen) calendar days from the occurrence of the force majeure with a notification letter accompanied by an official statement from the authorized local government official;*

(4) The absence of notification until the time as referred to in paragraph (3) has passed, results in the PARTIES / technical implementing units / ship owners / operators who have not experienced a force majeure event having the

untuk tidak mengakui adanya peristiwa keadaan kahar (*Force Majeure)* tersebut;

(5) Biaya-biaya yang timbul dan diderita oleh **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure)* bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** lainnya;

(6) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*Force Majeure)* harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai dengan **PERJANJIAN** ini paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah keadaan kahar (*Force Majeure)* tersebut berakhir berdasarkan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah setempat yang berwenang;

(7) Keadaan kahar (*Force Majeure)* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan **PERJANJIAN** akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan **PERJANJIAN** sampai keadaan kahar (*Force Majeure)* berakhir.

right not to acknowledge the existence of the force majeure event;

*(5) Costs incurred and suffered by the **PARTY** experiencing Force Majeure are not the responsibility of the other **PARTY**;*

*(6) The **PARTY** that has condition of Force Majeure must resume its obligations in accordance with this **AGREEMENT** no later than 7 (seven) calendar days after the Force Majeure ends based on an official statement from the authorized local Government Official;*

*(7) The Force Majeure which causes a delay in the implementation of this **AGREEMENT**, either in part or in whole, is not a reason for termination or cancellation of the **AGREEMENT**, but is only a condition which suspends the **AGREEMENT** until the Force Majeure expires.*

Pasal 14
BERAKHIRNYA PERJANJIAN

(1) **PERJANJIAN** ini berakhir apabila memenuhi salah satu atau semua ketentuan sebagai berikut:

a. Berakhirnya **PERJANJIAN** ini sesuai jangka waktu sebagaimana diatur dalam **PERJANJIAN**;

b. **PIHAK KEDUA** berhenti dan/atau tidak bersedia lagi melaksanakan Kegiatan yang telah didelegasikan **PIHAK PERTAMA**;

c. Akibat wanprestasi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **PERJANJIAN** ini; dan/atau

Article 14
TERMINATION OF THE AGREEMENT

*(1) This **AGREEMENT** shall terminate if any one or all of the following conditions shall occurs:*

*a. The termination of this **AGREEMENT** in accordance with the period as stipulated in the **AGREEMENT**;*

*b. The **SECOND PARTY** decides to stop and / or no longer willing to carry out the activities that have been delegated by the **FIRST PARTY**;*

*c. As a result of breach of contract committed by the **SECOND PARTY** upon the provisions as set forth in this **AGREEMENT**; and / or*

d. Adanya peraturan perundang-undangan yang memberhentikan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini.

(2) Apabila **PIHAK KEDUA** bermaksud untuk berhenti dan/atau tidak bersedia lagi melaksanakan Kegiatan yang telah didelegasikan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk mengajukan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya **PERJANJIAN** ini disertai alasan yang jelas.

(3) Pertimbangan terhadap pengajuan tertulis oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pengajuan diterima **PIHAK PERTAMA**.

(4) Dalam hal **PERJANJIAN** berakhir disebabkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** bertanggung jawab menyelesaikan kewajibannya sebagaimana ketentuan yang diatur dalam **PERJANJIAN** ini.

Pasal 15
WANPRESTASI

(1) Wanprestasi berarti wanprestasi **PIHAK PERTAMA** atau wanprestasi **PIHAK KEDUA**.

(2) Wanprestasi **PIHAK KEDUA** berarti setiap peristiwa Wanprestasi yang disengaja oleh **PIHAK KEDUA** untuk tidak melaksanakan kewajiban berdasarkan **PERJANJIAN** ini;

(3) Wanprestasi **PIHAK KEDUA** bukan peristiwa yang merupakan akibat dari Wanprestasi **PIHAK PERTAMA**, Perubahan

*d. The existence of the prevailing laws and regulations which terminate the implementation of this **AGREEMENT**.*

*(2) If the **SECOND PARTY** intends to stop and / or no longer willing to carry out the activities that have been delegated by the **FIRST PARTY** as referred to in paragraph (1) letter b, then the **SECOND PARTY** is obliged to submit notification in writing to the **FIRST PARTY** not later than 30 (thirty) days before the expiration of this **AGREEMENT** and shall be accompanied by the obvious reason.*

*(3) Consideration to the written submissions by the **SECOND PARTY** as referred to in paragraph (2) shall be issued by the **FIRST PARTY** no later than 14 (fourteen) working days after the same submission is accepted by **FIRST PARTY**.*

*(4) In the event this **AGREEMENT** is expired caused by reasons as referred to in paragraph (1) letter d, then the **PARTIES** shall be responsible for completing their respective obligations as stipulated in the provisions of this **AGREEMENT**.*

Article 15
BREACH OF AGREEMENT

*(1) Default means the default committed by the **FIRST PARTY** or the default committed by the **SECOND PARTY**.*

*(2) The **SECOND PARTY**'s default means any of the following events Intentional Default committed by the **SECOND PARTY** for not fulfilling material obligations under this **AGREEMENT**;*

*(3) Default committed by the **SECOND PARTY** is not an event that is a result of the **FIRST PARTY**'s Default, Change of Law that cause*

Hukum yang mengakibatkan Dampak Kerugian Material, atau Peristiwa Keadaan Kahar (*Force Majeure*).

Material Loss Impact, or Event of Force Majeure.

(4) Wanprestasi **PIHAK PERTAMA** berarti kegagalan **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan setiap kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini.

*(4) Default committed by the **FIRST PARTY** mean failure of the **FIRST PARTY** in performing any of its obligations under this **AGREEMENT**.*

(5) Akibat dari Wanprestasi:

a. Pemberitahuan wanprestasi apabila peristiwa wanprestasi terjadi, **PIHAK** yang tidak melanggar dapat mengirimkan pemberitahuan kepada **PIHAK** yang melanggar dengan menjabarkan pelanggaran yang dibuatnya (pemberitahuan wanprestasi);

b. Setelah diterimanya pemberitahuan tersebut, **PIHAK** yang melanggar akan diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk memulihkan Wanprestasi tersebut (jangka waktu pemulihan) sesuai pemberitahuan Wanprestasi.

(5) As a result of Default:

*a. A notice of default if a default event occurs, the **PARTY** that not committed event of default can send notifications to the defaulting **PARTY** by describing the violations made (notice of default);*

b. Upon receipt of such notice, the breaching PARTY shall be granted a period of no more than fourteen (14) working days to remedy such Default (the cure period) in accordance with the notice of Default.

(6) Selama jangka waktu Pemulihan, **PIHAK** yang melanggar harus tetap mengupayakan untuk memulihkan Wanprestasi dan **PARA PIHAK** tetap akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini yang tidak terpengaruh pelaksanaannya.

*(6) During the period of remedy, the defaulting **PARTY** must be keep trying to recover the Default and the **PARTIES** will still implement their respective obligations under this **AGREEMENT** which implementation is not affected by the event of default.*

(7) Pemberitahuan mengenai maksud pemutusan **PERJANJIAN** apabila menjelang akhir jangka waktu pemulihan Wanprestasi tersebut belum terpulihkan, maka **PIHAK** yang tidak melanggar dapat mengirimkan pemberitahuan atas maksudnya untuk memutus **PERJANJIAN** (pemberitahuan pemutusan **PERJANJIAN**).

*(7) Notice of the intention to terminate this **AGREEMENT**; if towards the end of the remedy period, the Default is not recoverable, the non-defaulting **PARTY** may send a notification on its intention to terminate this **AGREEMENT** (notice of the termination of **AGREEMENT**).*

(8) Apabila pemberitahuan pemutusan **PERJANJIAN** telah diterima, **PIHAK** yang melanggar memiliki jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja (jangka waktu pemulihan terakhir) untuk memulihkan Wanprestasi

*(8) If a notice of termination of the **AGREEMENT** has been accepted, then the defaulting **PARTY** shall have a period of 14 (fourteen) working days (the final remedy period) to recover the*

sesuai pemberitahuan pemutusan **PERJANJIAN**.

*Default in accordance with the notice of the termination of the **AGREEMENT**.*

(9) Selama jangka waktu pemulihan terakhir, **PIHAK** yang melanggar harus tetap mengupayakan pemulihan Wanprestasi, **PARA PIHAK** tetap akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan **PERJANJIAN** ini yang tidak terpengaruh oleh Wanprestasi tersebut.

*(9) During the final remedy period, the defaulting **PARTY** shall be keep trying to recover the Default and the **PARTIES** will still implement their respective obligations under this **AGREEMENT** which implementation is not affected by the event of default.*

(10) Apabila setelah jangka waktu pemulihan terakhir berakhir, Wanprestasi belum terpulihkan, **PIHAK** yang tidak melanggar dapat memutus **PERJANJIAN** ini dengan mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata.

(10) If after the final remedy period expires, the Default is not recoverable, the non-defaulting PARTY may terminate this AGREEMENT by waiving the Article 1266 and Article 1267 of the Indonesian Civil Code.

Pasal 16
PELAPORAN

Article 16
REPORTING

(1) Jenis pelaporan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** meliputi:

*(1) Type of reporting submitted by the **SECOND PARTY** to the **FIRST PARTY** shall include:*

a. Jumlah, Kualifikasi dan kompetensi Surveyor/Auditor yang melaksanakan survei/audit/verifikasi dalam rangka sertifikasi statutoria yang termutakhir, disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali;

a. The updated number, qualification, and competence of the surveyors carrying out survey for statutory certification shall be submitted every 6 (six) months.

b. Laporan kinerja pelayanan dalam pelaksanaan tugas pendelegasian survei/audit/verifikasi dan sertifikasi disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

b. Report of the service performance in the implementation of the delegated survey and certification competency that shall be submitted every 6 (six) months.

c. Salinan dari semua sertifikat sementara dan/atau permanen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan beberapa kewenangan yang didelegasikan disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan pada bulan berikutnya.

c. Copies of all provisional and/or permanent certificates issued by the SECOND PARTY under the delegated authorities shall be submitted no later than the 10th (tenth) day of each month in the following month.

d. Salinan bukti penyetoran PNBP terhadap semua sertifikat sementara dan/atau permanen yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**.

e. Salinan aturan internal **PIHAK KEDUA** sebagai *System Operational Procedure* (SOP) pelaksanaan tugas pendelegasian yang disampaikan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah aturan tersebut ditetapkan.

f. Daftar kapal yang disertifikasi statutoria oleh **PIHAK KEDUA** disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dengan format yang harus ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui system informasi yang disediakan dan disertai dengan laporan tertulis (fisik) sesuai format yang telah ditetapkan dan dapat diakses oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 17
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) **PERJANJIAN** ini akan diatur dan ditafsirkan sesuai dengan Hukum Indonesia;

(2) Setiap perselisihan/sengketa yang timbul terkait dengan **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat yang dituangkan dalam Berita Acara;

(3) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak dilakukan pertemuan untuk musyawarah dan mufakat, maka **PARA**

d. *Copies of all payment receipt for Non-Tax State Revenue to all shortterm certificates and/or fullterm certificates issued by **SECOND PARTY**.*

e. *Copy of the internal rules of the **SECOND PARTY** as System Operational Procedure (SOP) on the implementation of delegated task shall be submitted no later than 7 (seven) days after the internal rules are established.*

f. *The list of vessels statutorily certified by the SECOND PARTY shall be submitted every six (6) months.*

*(2) The report as referred to in paragraph (1) shall be submitted by the **SECOND PARTY** to the **FIRST PARTY** with the format that must be written in Indonesian and/or English languages.*

*(3) The report as refer to paragraph (1) and paragraph (2) conducted the information system provided and accompanied by a written (physical) report in accordance with the format that has been determined and can be accessed by the **PARTIES**.*

Article 17
SETTLEMENT OF DISPUTES

(1) *This **AGREEMENT** shall be governed and construed in accordance with Indonesian law;*

(2) *Upon any conflict / dispute that arise in relation to this **AGREEMENT**, the **PARTIES** agree to settle such dispute by consensus as outlined in the Official Report;*

(3) *If effort of the settlement of dispute as referred to in paragraph (2) cannot be achieved within a period of 30 (thirty) days after the first meeting for deliberation and consensus, then the*

PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

PARTIES *agree to settle the disputes through the State Courts in Central Jakarta;*

(4) Dalam hal terdapat suatu jumlah PNBP terhutang dan sudah jatuh tempo dan tidak dapat dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** berdasarkan pelaksanaan **PERJANJIAN** ini, maka penyelesaian PNBP terhutang diselesaikan berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan dibidang PNBP.

(4) In the case of any outstanding Non-Tax State Revenue (PNBP) that has become due and payable but cannot be settled by the ***SECOND PARTY*** *under the implementation of this* ***AGREEMENT****, the settlement of such outstanding PNBP shall be carried out in accordance with the provisions of the prevailing laws and regulations in the field of Non-Tax State Revenue.*

Pasal 18
PERTANGGUNGJAWABAN

PIHAK KEDUA dapat mengalihkan secara keseluruhan atau sebagian dari **PERJANJIAN** berdasarkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**. Jika pengalihan telah disetujui, **PIHAK** yang mengalihkan tetap sebagai penanggungjawab utama terhadap **PIHAK** lainnya atas segala kewajiban yang dialihkan.

Article 18
LIABILITY

The ***SECOND PARTY*** *may not assign the whole or part of the* ***AGREEMENT*** *without the written consent of the* ***FIRST PARTY****. If the assignment has been approved, the assigning* ***PARTY*** *remains hold the main responsibility against the other* ***PARTY*** *related to all obligations being assigned.*

Pasal 19
ADDENDUM

Perubahan terhadap **PERJANJIAN** ini dan lampiran-lampirannya akan berlaku efektif hanya setelah komunikasi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, baik dengan mengubah dan/atau menambah ketentuan dalam **PERJANJIAN** ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam bentuk Addendum, untuk kemudian Addendum dimaksud menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan **PERJANJIAN** ini.

Article 19
ADDENDUM

Addendum to this ***AGREEMENT*** *as well as the annexes thereof will be effective only after being communicated between the* ***FIRST PARTY*** *and the* ***SECOND PARTY****, either by the changing and / or make addition to the provisions of the* ***AGREEMENT****, then the* ***PARTIES*** *agreed to put it in the form of Addendum, such Addendum shall be an integral and separable part to this* ***AGREEMENT****.*

Pasal 20
PEMBERITAHUAN

(1) Suatu pemberitahuan atau bentuk komunikasi lainnya sehubungan dengan

Article 20
ANNOUNCEMENT

(1) A notice or other communication in connection with this ***AGREEMENT*** *may be in the form of:*
a. Written; and / or

PERJANJIAN ini dapat dilakukan dalam bentuk:
a. Tertulis; dan/atau
b. Lisan.

(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikirimkan pada alamat yang disebutkan di bawah ini atau kepada alamat lainnya yang diberitahukan kepada **PARA PIHAK** secara tertulis:

b. *Verbal.*

*(2) The notification as referred to in paragraph (1) letter a above shall be sent to the address mentioned below or to such other address notified to the **PARTIES** in writing:*

PIHAK PERTAMA
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta - 10110
Telp. : (021) 3811308
Fax : (021) 3844492
Email : ditkapel@dephub.go.id
subdit1.kplp@kemenhub.go.id
U.p. Direktur Jenderal Perhubungan Laut

FIRST PARTY
Directorate General of Sea Transportation
Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta - 10110
Telp. : (021) 3811308
Fax : (021) 3844492
Email : ditkapel@dephub.go.id
subdit1.kplp@kemenhub.go.id
U.p. Director General for Sea Transportation

PIHAK KEDUA
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Jl. Yos Sudarso Nomor 38-40 Tanjung Priok
Jakarta - 14320
Telp. : (021) 4301017
Fax : (021) 43936175
Email : sta@bki.co.id
U.p. Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

SECOND PARTY
PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)
Jl. Yos Sudarso Nomor 38-40 Tanjung Priok
Jakarta - 14320
Telp. : (021) 4301017
Fax : (021) 43936175
Email : sta@bki.co.id
U.p. Director of Classification Business Operations PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan melalui penghubung (*liaison officer*) yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK**.

*(3) The notification as referred to in paragraph (1) letter b above shall be sent via liaison officer appointed by the **PARTIES.***

Pasal 21
BAHASA

Article 21
LANGUAGE

(1) **PERJANJIAN** ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa yaitu teks Bahasa Indonesia dan teks Bahasa Inggris.

*(1) This **AGREEMENT** is written in English and Indonesian Language.*

(2) Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran atas pelaksanaan ketentuan **PERJANJIAN**, maka teks Bahasa Indonesia yang diberlakukan.

(2) In the event of discrepancy between the English and Indonesian Language version, the Indonesian Language version is the prevailing one.

LAMPIRAN I PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DJPL DAN PT BKI
ANNEX I OF COOPERATION AGREEMENT BETWEEN DGST AND PT BKI
NO : HK.201/1/1/DJPL/2026
NO : B.00535/HK.503/KI-26
DATE : 12 Januari 2026

KEWENANGAN STATUTORIA KAPAL BERBENDERA INDONESIA DENGAN DAERAH PELAYARAN INTERNASIONAL YANG DIDELEGASIKAN KE PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

Delegation of Authorities to PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) for Indonesian Flagged Ships Sailing Internationally

Terhadap kapal-kapal berukuran 500GT atau lebih, pendelegasian kewenangan statutoria kepada PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) meliputi:

[To ships 500 gross ton and upward, Delegation of Authorities to PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) comprising the following;]

NO	SERTIFIKAT *CERTIFICATE*	PENDELEGASIAN DELEGATION				
1	1974 SOLAS CONVENTION, PROTOCOL 88 AND OTHER MANDATORY SOLAS INSTRUMENTS	IAS /A/V	RS/ A/V	AIPS/ A/IMV	EXEM P	APR
1.1	Document of Compliance (ISM Code)	F	F	F	N	F
1.2	Safety Management Certificate (ISM Code)	F	F	F	N	F
1.3	International Ship Security Certificate (ISPS Code)	P	P	P	N	N
1.4	Passenger Ship Safety Certificate (all sized)	F	F	F	N	N
1.5	Cargo Ship Safety Construction Certificate	F	F	F	N	N
1.6	Cargo Ship Safety Equipment Certificate	F	F	F	N	N
1.7	Cargo Ship Safety Radio Certificate	F	F	F	N	F
1.8	High Speed Craft Safety Certificate	F	F	F	N	N
1.9	Fitness Certificate for the Carriage of Dangerous Chemical in Bulk	F	F	F	N	F
1.10	Fitness Certificate for the Carriage of Liquefied Gasses in Bulk	F	F	F	N	F
1.11	Special Requirements for Ships Carrying Dangerous Goods	F	F	F	N	F
1.12	Certificate of Compliance with International Maritime Solid Bulk Cargo (IMSBC Code)	F	F	F	N	F
1.13	Safety Certificate for Ships Carrying Industrial Personnel	F	F	F	N	F
1.14	International Certificate of Fitness for the Carriage of INF Cargo	F	F	F	N	F
1.15	Document of Authorization for the Safe Carriage of Grain in Bulk	F	F	F	N	F
1.16	Special Purpose Ship Safety Certificate	F	F	F	N	F
1.17	Stability Instrument	F	N/A	N/A	N/A	F
1.18	Lifting Appliances and Anchor Handling Winches	F	N/A	N/A	N/A	F

2	MARPOL 73/78 CONVENTION	IAS /A/V	RS/ A/V	AIPS/ A/IMV	EXEM P	APR
2.1	International Oil Pollution Prevention (IOPP) Certificate	F	F	F	N	F
2.2	International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances (NLS)	F	F	F	N	F
2.3	International Sewage Pollution Prevention (ISPP) Certificate	F	F	F	N	F
2.4	International Air Pollution Prevention (IAPP) Certificate	F	F	F	N	F
2.5	Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP) Certificate	F	F	F	N	F
2.6	International Energy Efficiency Certificate (IEEC)	F	F	F	N	F
2.7	COC SEEMP Part II & III	F	N/A	N/A	N	F
3	**ANTI FOULING SYSTEM CONVENTION, 2001**	**IAS /A/V**	**RS/ A/V**	**AIPS/ A/IMV**	**EXEM P**	**APR**
3.1	International Anti Fouling System (AFS) Certificate	F	F	F	N	F
4	**INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE CONTROL AND MANAGEMENT OF SHIP BALLAST WATER AND SEDIMENT, 2004**	**IAS /A/V**	**RS/ A/V**	**AIPS/ A/IMV**	**EXEM P**	**APR**
4.1	International Ballast Water Management (IBWM) Certificate	F	F	F	N	F
5	**ILLC 1966 AND PROTOCOL 88**	**IAS /A/V**	**RS/ A/V**	**AIPS/ A/IMV**	**EXEM P**	**APR**
5.1	International Load Line Certificate	F	F	F	N	F

Keterangan:
Remarks:

IAS/A/V : *Initial/ Additional Survey/Audit/Verification ISPS* (Survey/Audit Pertama/Tambahan/ Verifikasi ISPS)

RS/A/V : *Renewal Survey/Audit/ Verification ISPS* (Survey/Audit Pembaharuan/Verifikasi ISPS)

AIPS/A/IMV : *Annual Intermediate Periodical Survey/Audit/Intermediate Verification ISSC* (Survey/Audit Tahunan Antara Periodikal/Verifikasi Antara ISSC)

EXEMP : *Exemption* (Pembebasan)

APR : *Document Approval* (Pengesahan Dokumen)

N/A : *Not Applicable* (Tidak Diterapkan)

F : *Full* (Penuh)

P : *Partial* (Hanya berhak menerbitkan sertifikat sementara)

N : *No* (Tidak)

*) : *After national legislations related thereto have been set up* (setelah peraturan nasional ditetapkan)

**) : Untuk Kapal Bangunan Baru, Kapal Ganti Bendera, Kapal Ganti Nama dengan daerah pelayaran semua lautan, Sertifikasi initial survey di lakukan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, dan PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) dapat melakukan sertifikasi setelah ada nota dinas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Direktorat Perkapalan dan Kepelautan.

LAMPIRAN II PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
DJPL DAN PT BKI
ANNEX II OF COOPERATION AGREEMENT BETWEEN
DGST AND PT BKI
NO : HK.201/1/1/DJPL/2026
NO : B.00535/HK.503/KI-26
DATE : 12 Januari 2026

KEWENANGAN STATUTORIA KAPAL BERBENDERA INDONESIA DENGAN DAERAH PELAYARAN DOMESTIK YANG DIDELEGASIKAN KE PT. BIRO KLASIFIKASI INDONESIA (PERSERO)

Delegation of Authorities to PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) for Indonesian Flagged Ships Sailing Domestically

Terhadap kapal-kapal ~~berukuran 500GT atau lebih~~ yang diklasifikasikannya, ~~pendelegasian kewenangan statutoria kepada~~ PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) ~~meliputi~~: dapat melakukan kewenangan statutoria sebagai berikut :
[To ships under its class, PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) can exercise the following statutory authorities;]

NO	SERTIFIKAT *CERTIFICATE*	PENDELEGASIAN *DELEGATION*				
1	**PERATURAN NASIONAL TENTANG MANAJEMEN KESELAMATAN KAPAL (PM 45 Tahun 2012 beserta perubahannya)**	**IAS/ A**	**RS/A**	**AIPS /A**	**EXEMP**	**APR**
1.1	Document of Compliance (ISM Code)	P	P	P	N	N
1.2	Safety Management Certificate (ISM Code)	P	P	P	N	N
2	**PERATURAN NASIONAL TENTANG KELAIKLAUTAN KAPAL KECEPATAN TINGGI (PM 12 Tahun 2022 beserta perubahannya)**	**IAS/ A**	**RS/A**	**AIPS /A**	**EXEMP**	**APR**
2.1	High Speed Craft Safety Certificate	F	F	F	N	F
3	**PERATURAN NASIONAL TENTANG PENCEGAHAN PENCEMARAN MARITIM (PM 29 Tahun 2014 beserta perubahannya)**	**STATEMENT OF COMPLIANCE**				
3.1	Condition Assessment Scheme (CAS) Statement of Compliance	P				
4	**PERATURAN NASIONAL TENTANG GARIS MUAT (PM 39 Tahun 2016 beserta perubahannya)**	**IAS/ A**	**RS/A**	**AIPS /A**	**EXEMP**	**APR**
4.1	Load Line Certificate	F	F	F	N	F
	(*Note: Based on owner preference if the ship entitled to 2 (two) Clasification Society)					

5	**PERATURAN NASIONAL TENTANG STABILITAS KAPAL (PM 44 Tahun 2021 beserta perubahannya)**	**IAS/ A**	**RS/A**	**AIPS /A**	**EXEMP**	**APR**
5.1	Stability Instrument	F	N/A	N/A	N/A	F

Keterangan:
Remark:

IAS/A	:	*Initial/ Additional Survey/Audit* (Survey/Audit Pertama/Tambahan)
RS/A	:	*Renewal Survey/Audit* (Survey/Audit Pembaharuan)
AIPS/A	:	*Annual Intermediate Periodical Survey/Audit* (Survey/Audit Tahunan Antara Periodikal)
EXEMP	:	*Exemption* (Pembebasan)
APR	:	*Document Approval* (Pengesahan Dokumen)
N/A	:	*Not Applicable* (Tidak Diterapkan)
F	:	*Full* (Penuh)
P	:	*Partial* (Hanya berhak menerbitkan sertifikat sementara)
N	:	*No* (Tidak)

Pasal 22
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Dalam hal Kapal berbendera Indonesia tidak dapat mempertahankan klasifikasi atau tidak dapat memenuhi Peraturan klasifikasi dari **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK PERTAMA** melakukan survei, verifikasi dan sertifikasi statutoria kapal berbendera Indonesia;

(2) Apabila dalam kebutuhan khusus bagi kepentingan operasional pemilik kapal, maka statutoria tetap dapat dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Article 22
MISCELLANEOUS PROVISIONS

(1) In the case that an Indonesian-flagged ship is unable to maintain its classification or to comply with the classification rules of the SECOND PARTY, the FIRST PARTY shall carry out the statutory survey, verification and certification of such Indonesian-flagged ship.

*(2) In case of special needs for operational interest of ship owner, so statutory still conducted by **FIRST PARTY**.*

Demikian **PERJANJIAN** ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

*In witness whereof, this Cooperation **AGREEMENT** is made and signed on the day, date, month, year and place as mentioned above in 2 (two) original duplicates, each having duly stamped and has the same legal effect once signed by the **PARTIES.***

PIHAK PERTAMA,
FIRST PARTY,

MUHAMMAD MASYHUD

PIHAK KEDUA,
SECOND PARTY,

R. BENNY SUSANTO

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PT FINNET INDONESIA
Nomor : HK.201/5/8/DJPL/2026
Nomor : 010/PKS-002/FINNET-000/VI/2026

TENTANG
PENYEDIAAN LAYANAN *PAYMENT GATEWAY* UNTUK PENERIMAAN *ONLINE PAYMENT* PADA *PLATFORM DIGITAL* MARITIMHUB

Pada hari ini Rabu tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-06-2026), bertempat di Jakarta yang bertandatangan dibawah ini:

I. MUHAMMAD MASYHUD : Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 74/TPA Tahun 2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat No. 8, Gedung Karsa Lt. 4, Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KESATU"**.

II. RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN : Direktur Utama PT Finnet Indonesia, berdasarkan Akta Perubahan terakhir susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan Terakhir No.10 tanggal 10 Juli 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Utiek R. Abdurachman, S.H, M.LI., M.Kn sebagaimana telah mendapat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.09-0309721 tanggal 11 Juli 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Finnet Indonesia, berkedudukan dan berkantor di Telkom Landmark Tower, Jalan Gatot Subroto Kav.52, Jakarta

Selatan, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA".**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**" atau secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**PIHAK**" sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanan kebijakan di bidang pelayaran.

b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan perusahaan jasa sistem pembayaran yang telah mendapatkan izin lisensi layanan *Payment Gateway* dari Bank Indonesia No 23/573/DKSP/Srt/B dan telah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Digital PSE No. 00804/DJAI.PSE/06/2021, dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120313151914.

c. Bahwa **PIHAK KESATU** memiliki dan mengelola Platform Digital MaritimHub yang berfungsi sebagai portal layanan dan data terpadu guna menyatukan seluruh layanan kemaritiman untuk mendukung efisiensi, transparansi, dan transformasi digital di sektor transportasi laut.

d. Bahwa **PIHAK KEDUA** berperan sebagai penyedia layanan *Payment Gateway* pada Platform Digital MaritimHub milik **PIHAK KESATU**.

e. Bahwa **PARA PIHAK** memandang perlu adanya penyediaan layanan Internet *Payment Gateway* untuk Penerimaan *Online Payment* pada Platform Digital MaritimHub guna memfasilitasi transaksi Pembayaran dalam Platform Digital MaritimHub.

Selanjutnya **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat saling bekerjasama dalam penyediaan layanan Internet *Payment Gateway* Untuk Penerimaan *Online Payment* pada Platform Digital MaritimHub, selanjutnya disebut **"Perjanjian"**, dengan didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1
DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 252 Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7003);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
4. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2022 tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1356);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415);
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran (Lembar Negara Tahun 2016 Nomor 236);
10. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (Lembar Negara Tahun 2021 Nomor 147).

PASAL 2
DEFINISI DAN INTERPRETASI

(1) Dalam Perjanjian ini, kecuali ditentukan lain dalam hubungan kalimat dalam pasal-pasal yang bersangkutan, istilah yang digunakan mempunyai arti dan penafsiran yang sama bagi **PARA PIHAK** sebagai berikut:

a. **Platform Digital MaritimHub** adalah sistem elektronik terintegrasi yang dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KESATU**, dimana pelanggan dapat melakukan pembayaran secara *online*;

b. **Berita Acara Uji Terima (BAUT)** adalah bukti tertulis yang ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK**, yang membuktikan bahwa *Online Payment* telah dapat dioperasikan secara komersial;

c. **Berita Acara Uji Terima (BAUT) Instrumen pembayaran** adalah bukti tertulis yang ditandatangani oleh wakil yang sah dari **PARA PIHAK** yang membuktikan bahwa suatu Instrumen pembayaran telah dapat dioperasikan secara komersil dalam *Online Payment*;

d. ***Fraud*** adalah bentuk transaksi dengan menggunakan Instrumen Pembayaran pada *Online Payment* yang patut dicurigai sebagai transaksi tidak normal;

e. ***Fraud Detection System*** adalah kemampuan sistem yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** untuk mendeteksi potensi terjadinya *Fraud*;

f. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender tanpa terkecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja;

g. **Hari Kerja** adalah hari Senin sampai dengan Jumat di luar hari libur resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan mengacu juga pada ketentuan Hari Kerja menurut Bank Indonesia;

h. ***Host* PIHAK KEDUA** adalah pusat komputer **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai penghubung antara *Host* **PIHAK KESATU** dengan Instrumen pembayaran dan berfungsi untuk menerima dan memproses *Online Payment*;

i. **Instrumen Pembayaran** adalah sumber dana untuk pembayaran dan ditatausahakan dalam suatu akun untuk pembayaran *Online Payment*;

j. **Lampiran** adalah setiap lampiran, tambahan atau dokumen, yang dilampirkan pada Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

k. **Laporan Hasil Rekonsiliasi** adalah laporan atas Rekonsiliasi yang dilakukan **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**;

l. **Link Komunikasi Data** adalah media penghubung berupa Koneksi Internet yang berfungsi sebagai sarana komunikasi data antara *Host* **PIHAK KESATU** dengan *Host* **PIHAK KEDUA**;

m. **Menu Pembayaran** adalah fasilitas pada Platform Digital MaritimHub yang menyediakan berbagai pilihan cara/metode pembayaran *Online Payment*;

n. ***Online Payment*** adalah transaksi pembayaran secara *online* melalui *Platform Digital* dengan memanfaatkan *Payment Gateway*;

o. ***Payment Gateway*** adalah sistem yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** berupa kanal pembayaran elektronik yang digunakan untuk memproses *Online Payment*, penyediaan layanan elektronik yang memungkinkan untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *proprietary channel*;

p. **Pelanggan** adalah Pengguna atau user dari Platform Digital MaritimHub;

q. **Pemroses Data Pribadi** adalah **PIHAK** yang melakukan pemrosesan data pribadi. Pemrosesan ini meliputi serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap data pribadi, seperti pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan, dan penghapusan data pribadi;

r. **Pengendali Data Pribadi** adalah setiap **PIHAK** yang menentukan tujuan dan melakukan kendali terhadap pemrosesan Data Pribadi;

s. **Rekonsiliasi** adalah proses menyamakan data *Online Payment* antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**;

t. **Restitusi** adalah **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan ganti kerugian atau pembayaran Kembali dari **PIHAK KEDUA**;

u. ***Service Level*** adalah standard tingkat layanan operasional yang harus dipenuhi oleh **PIHAK KEDUA** guna kelancaran *Online Payment*;

v. ***Settlement*** adalah perhitungan dan pelaksanaan penyelesaian atas keseluruhan dana Transaksi Berhasil dengan cara **PIHAK KEDUA** menyetorkannya kepada Kas Negara sesuai dengan Pola Settlement yang disepakati **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini;

w. ***Standard Operating Procedure* (SOP)** adalah sekumpulan instruksi maupun pedoman berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang berisi arahan dan tata cara yang menjadi tolok ukur dalam pengoperasian *Online Payment* serta merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;

x. **Transaksi Berhasil** adalah status transaksi *Online Payment* yang dinyatakan berhasil dengan dibuktikan dengan sebuah tanda bukti struk atau bukti lain yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA**;

(2) ***Interpretasi*** **PARA PIHAK** sepakat bahwa dalam Perjanjian ini:

a. Judul suatu pasal atau ayat semata-mata hanya untuk kemudahan saja dan tidak dapat dianggap mempunyai arti dalam menafsirkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;

b. Kata-kata dalam bentuk tunggal dapat mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;

c. Apabila suatu hari atau tanggal yang ditetapkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu hak atau kewajiban masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini, jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau hari libur nasional, maka pelaksanaan hak atau kewajiban tersebut dianggap jatuh pada Hari Kerja berikutnya, kecuali apabila ditetapkan lain secara tegas oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini;

d. Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian antara **PARA PIHAK** dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

a. penyediaan dan pengintegrasian layanan *Payment Gateway* pada Platform Digital MaritimHub;
b. penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi beserta sarana pendukungnya;
c. pelaksanaan operasional transaksi, *helpdesk*, rekonsiliasi, dan *settlement*;
d. pertukaran data dan/atau informasi;
e. pengawasan keamanan siber, mitigasi risiko kelalaian/kejahatan (*fraud*), pelaksanaan audit, dan evaluasi sistem;
f. sosialisasi dan edukasi layanan pembayaran; dan
g. monitoring dan evaluasi.

PASAL 4
OBJEK PERJANJIAN

Kerjasama Layanan *Payment Gateway* pada Platform Digital MaritimHub untuk pelayanan publik dalam melakukan transaksi dengan menyediakan berbagai instrumen pembayaran.

PASAL 5
PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Perjanjian akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam rencana kerja bersama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
(2) Rencana kerja bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditandatangani paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Perjanjian ini ditandatangani; dan
(3) Dalam melaksanakan kegiatan Perjanjian ini **PARA PIHAK** akan saling berkoordinasi melalui perwakilan masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kebutuhan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) **PIHAK KESATU** berhak:
   a. Memperoleh layanan *Payment Gateway* untuk penerimaan *Online Payment* pada Platform Digital MaritimHub, dengan *Service Level* sebagaimana dimaksud Lampiran I Perjanjian ini;
   b. Menerima data Transaksi Berhasil dari **PIHAK KEDUA** sesuai Pola *Settlement* pada Lampiran II Perjanjian ini;
   c. Mengetahui data *Online Payment* di sisi **PIHAK KEDUA**.

(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
   a. Menyediakan perangkat lunak (*software*) untuk digunakan sebagai *Host* **PIHAK KESATU** dengan *message format* sesuai spesifikasi **PIHAK KEDUA**;
   b. Menyediakan Link Komunikasi Data untuk kebutuhan sebagai berikut:
      i. Menghubungkan antara *Host* **PIHAK KESATU** dengan Host **PIHAK KEDUA**;
      ii. Kebutuhan *backup* komunikasi hubungan Host **PIHAK KESATU** ke *Host* **PIHAK KEDUA**;
   c. Membuat SOP untuk keperluan pengoperasian *Online Payment* bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA**;
   d. Bersama-sama dengan **PIHAK KEDUA** menandatangani BAUT dan/atau BAUT Instrumen pembayaran dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk menambahkan Instrumen pembayaran yang dapat ikut serta dalam *Online Payment*;
   e. Menyediakan *Online Payment* yaitu Platform Digital MaritimHub;
   f. Menyediakan menu Instrumen pembayaran;
   g. Mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai mekanisme pembayaran secara jelas dan mudah dipahami oleh pelanggan;
   h. Menyediakan *Helpdesk* sesuai jam operasional untuk menerima dan menangani gangguan *Online Payment*;
   i. Menjamin kelancaran operasional di sisi *Host* **PIHAK KESATU** dengan selalu menginformasikan kepada **PIHAK KEDUA** atas setiap perubahan maupun gangguan yang terjadi pada *Host* **PIHAK KESATU**;
   j. Memberikan dukungan dalam pengoperasian, pemeliharaan dan keamanan sistem pada sisi **PIHAK KESATU** untuk kelancaran *Online Payment*;
   k. Menyediakan data *Online Payment* di sisi **PIHAK KESATU**;
   l. Melakukan Rekonsiliasi bersama dengan **PIHAK KEDUA**;
   m. Menanggung pemenuhan tanggung jawab atas *Fraud* yang terjadi dalam pelaksanaan *Online Payment* (apabila *Fraud* tersebut terbukti kesalahan atau dilakukan dan/atau kelalaian oleh **PIHAK KESATU**) sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
   n. Memiliki dua faktor otentikasi sistem dan data (*two factor authentication*) pada Platform Digital MaritimHub;
   o. Melakukan sosialisasi "bahaya penipuan" pada Platform Digital MaritimHub sesuai kebutuhan;
   p. Memberikan laporan hasil audit keamanan *cyber* dan audit sistem informasi setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak:
   a. Mengetahui data *Online Payment* di sisi **PIHAK KESATU**;
   b. Menerima pembayaran dalam *Online Payment* yang telah sesuai dengan Peraturan Undang-Undang atau Instrumen Pembayaran secara terbatas, dan

menolak pembayaran dalam *Online Payment* yang bertentangan dengan Undang-Undang atau Instrumen Pembayaran secara terbatas;

c. Mengolah dan memanfaatkan data pelanggan **PIHAK KESATU** sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

a. Menyediakan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) untuk *Host* **PIHAK KEDUA** yang berfungsi sebagai *messaging server* dengan *message format* sesuai spesifikasi **PIHAK KEDUA**;

b. Menyediakan Link Komunikasi Data untuk kebutuhan sebagai berikut:
   i. Menghubungkan antara *Host* **PIHAK KEDUA** dengan Instrumen pembayaran;
   ii. Kebutuhan *backup* komunikasi hubungan antara *Host* **PIHAK KEDUA** dengan Instrumen pembayaran**;**

c. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** membuat SOP untuk keperluan pengoperasian *Online Payment* agar dapat terlaksana dengan baik dan lancar;

d. Bersama-sama dengan **PIHAK KESATU** menandatangani BAUT dan/atau BAUT Instrumen pembayaran, dalam hal **PARA PIHAK** sepakat untuk menambahkan Instrumen pembayaran yang dapat ikut serta dalam *Online Payment*;

e. Menyediakan Layanan *Payment Gateway*;

f. Mengadakan koneksi ke arah Instrumen pembayaran dengan *Service Level* sebagaimana dimaksud Lampiran I Perjanjian ini;

g. Selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu melakukan operasional dan monitoring atas Layanan *Payment Gateway*;

h. Menyediakan *Helpdesk* selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu untuk menerima dan menangani gangguan Layanan *Payment Gateway* oleh dan dari **PIHAK KESATU**;

i. Menjamin kelancaran operasional di sisi *Host* **PIHAK KEDUA** dengan selalu menginformasikan kepada **PIHAK KESATU** atas setiap perubahan maupun gangguan yang terjadi pada *Host* **PIHAK KEDUA**;

j. Menyediakan data *Online Payment* di sisi **PIHAK KEDUA**;

k. Melakukan Rekonsiliasi bersama dengan **PIHAK KESATU;**

l. Menyediakan Laporan Hasil Rekonsiliasi;

m. Melakukan *Settlement* sesuai ketentuan perundang-undangan;

n. Menyediakan *Fraud Detection System;*

o. Menanggung pemenuhan tanggung jawab atas fraud yang terjadi dalam pelaksanaan *Online Payment* (apabila *fraud* tersebut terbukti kesalahan atau dilakukan dan/atau kelalaian oleh **PIHAK KEDUA**) sehingga hal-hal demikian sepenuhnya menjadi resiko dan beban serta tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;

p. Memberikan laporan hasil audit keamanan *cyber* dan audit sistem informasi setiap 1 (satu) Tahun sekali kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat dilakukan perpanjangan berdasarkan atas kesepakatan **PARA PIHAK**;

(2) **PARA PIHAK** sepakat untuk menyatakan Perjanjian ini berlaku efektif apabila syarat-syarat teknis dan administrasi telah dipenuhi oleh **PARA PIHAK**.

(3) **PARA PIHAK** dapat melakukan perpanjangan Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu tertentu dengan terlebih dahulu

membuat kesepakatan tertulis yang disetujui oleh **PARA PIHAK** paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

PASAL 8
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian berakhir apabila:
   a. Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan oleh **PARA PIHAK**;
   b. Salah satu **PIHAK** memutuskan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu Perjanjian berakhir berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
   c. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Perjanjian ini.

(2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum Jangka Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan kehendaknya tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) Bulan sebelum tanggal pengakhiran berlaku efektif dan tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** untuk menyelesaikan terlebih dahulu kegiatan yang sedang dilaksanakan akibat Perjanjian ini.

(3) Apabila **PIHAK** yang menerima pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memberikan jawaban dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender, maka **PIHAK** yang menerima pemberitahuan dianggap menyetujui terhadap usulan pengakhiran Perjanjian tersebut, dengan demikian Perjanjian ini dianggap berakhir pada tanggal yang dikehendaki dalam pemberitahuan tertulis tersebut.

(4) Akibat lebih lanjut dari berakhirnya Perjanjian sebagaimana dimaksud ayat (3), maka **PARA PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

(5) Dengan berakhirnya Perjanjian ini, tidak membebaskan masing-masing **PIHAK** atas kewajibannya yang timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini sampai kewajiban tersebut dinyatakan selesai, yang dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** dalam Perjanjian ini;

(6) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang ketentuan tersebut mensyaratkan adanya suatu putusan atau penetapan hakim atau pengadilan untuk mengakhiri suatu perjanjian, sehingga pemutusan Perjanjian ini dengan alasan sebagaimana diatur pada Pasal ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK**.

(7) Dalam hal Perjanjian ini berakhir dan/atau dinyatakan berakhir, **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat **PARA PIHAK**.

PASAL 9
MONITORING DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian baik secara sendiri - sendiri atau bersama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsi **PARA PIHAK**.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan dan disampaikan kepada pimpinan **PARA PIHAK** sebagai pertimbangan untuk penyempurnaan pelaksanaan Perjanjian ini.

PASAL 10
KELALAIAN (WANPRESTASI)

(1) Dalam hal terjadi atau timbul salah satu hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini akan merupakan suatu kejadian kelalaian terhadap Perjanjian ini:

a. Wanprestasi dalam Perjanjian
Salah satu **PIHAK** lalai melaksanakan sesuatu kewajibannya atau melanggar sesuatu ketentuan yang termasuk dalam Perjanjian ini;

b. Pernyataan Tidak Benar
Dalam hal ternyata bahwa sesuatu pernyataan atau jaminan yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya atau tidak sesuai dengan hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;

c. Permohonan Kepailitan
Dalam hal salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan pembayaran hutang-hutang (*surseance van betaling)* atau bilamana orang atau **PIHAK** lain mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang agar salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian ini dinyatakan dalam keadaan pailit;

d. Terkena Sitaan
Apabila salah satu **PIHAK** dikenakan suatu sitaan berkekuatan hukum tetap, baik sebagian maupun keseluruhan harta benda/kekayaannya yang mempengaruhi kemampuan **PIHAK** yang dikenakan sita untuk melaksanakan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

(2) Akibat dari Wanprestasi:

a. Pemberitahuan Wanprestasi

i. Apabila peristiwa wanprestasi terjadi, **PIHAK** yang tidak melakukan wanprestasi dapat mengirimkan pemberitahuan kepada **PIHAK** yang melakukan wanprestasi dengan menjabarkan pelanggaran yang dibuatnya dan jangka waktu yang diperlukan untuk pemulihannya (**"Pemberitahuan Wanprestasi"**);

ii. Setelah diterimanya Pemberitahuan Wanprestasi, **PIHAK** yang melakukan Wanprestasi harus segera memulihkan Wanprestasi tersebut dalam jangka waktu sesuai dengan yang diminta dalam Pemberitahuan

Wanprestasi, dimana **PIHAK** yang melanggar diberikan waktu sedikitnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja ("**Jangka Waktu Pemulihan**"); dan

iii. Selama Jangka Waktu Pemulihan, **PIHAK** yang melakukan Wanprestasi harus tetap mengupayakan untuk memulihkan Wanprestasi dan **PARA PIHAK** tetap akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terpengaruh pelaksanaannya.

b. Pemberitahuan mengenai maksud pemutusan Perjanjian ini.

i. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum akhir Jangka Waktu Pemulihan, Wanprestasi tersebut belum terpulihkan, maka **PIHAK** yang tidak melanggar dapat mengirimkan pemberitahuan atas maksudnya untuk memutus Perjanjian ini ("**Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian**");

ii. apabila Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian telah diterima, **PIHAK** yang melanggar memiliki jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kerja untuk memulihkan Wanprestasi sesuai Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian; dan

iii. selama Jangka Waktu Pemulihan, **PIHAK** yang melanggar harus tetap mengupayakan pemulihan Wanprestasi, dan **PARA PIHAK** tetap akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang tidak terpengaruh oleh Wanprestasi tersebut.

(3) Dalam hal **PIHAK** yang melanggar telah menyelesaikan pemulihan Wanprestasi sebelum **Jangka Waktu Pemulihan** terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) ii berakhir dan **PIHAK** yang tidak melanggar telah sepakat atas penyelesaian pemulihan Wanprestasi, maka Pemberitahuan Pemutusan Perjanjian ini gugur dengan sendirinya.

(4) Apabila setelah **Jangka Waktu Pemulihan** terakhir berakhir sebagaimana dimaksud dalam huruf a (ii) di atas, Wanprestasi belum terpulihkan, **PIHAK** yang tidak melanggar dapat memutus Perjanjian ini.

(5) Dalam hal suatu kejadian berdasarkan Pasal 8 ayat (1) ini terjadi oleh satu **PIHAK**, maka **PIHAK** lainnya dalam Perjanjian ini dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian ini. Pengakhiran Perjanjian akibat terjadinya hal-hal sebagaimana Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Perjanjian ini.

PASAL 11
MEKANISME PERUBAHAN INSTRUMEN PEMBAYARAN

(1) **PIHAK KEDUA** wajib melakukan pemberitahuan melalui surat kepada **PIHAK KESATU** apabila hendak melakukan perubahan Instrumen pembayaran.

(2) Perubahan Instrumen pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah adanya persetujuan dari **PIHAK KESATU.**

PASAL 12
STANDAR LAYANAN (*SERVICE LEVEL*)

(1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa *Service Level* kepada **PIHAK KESATU** sesuai Lampiran I Perjanjian ini.

(2) Perhitungan *Service Level* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

a. *Host* **PIHAK KEDUA**;
b. Link Komunikasi Data **PIHAK KEDUA** – Instrumen pembayaran;
c. Tidak diperhitungkan *Force Majeure*;
d. Tidak diperhitungkan *Host* **PIHAK KESATU**
e. Tidak diperhitungkan layanan dari issuer Instrument Pembayaran.

(3) Apabila *Service Level* yang diperjanjikan dalam ayat 1 tidak terpenuhi, maka **PIHAK KESATU** berhak mendapatkan restitusi dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

(4) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** dengan syarat **PIHAK KEDUA** telah menerima pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** mengenai klaim yang terjadi.

(5) Restitusi tidak berlaku dalam hal terjadi gangguan yang disebabkan oleh:

a. Terjadinya *Force Majeure*;
b. Pemeliharaan berkala masing-masing **PIHAK** dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK** lainnya;
c. Gangguan teknis pada jaringan telekomunikasi yang digunakan pada Perjanjian ini;
d. Gangguan teknis pada *Host* **PIHAK KESATU**.
e. Gangguan teknis pada penyedia Instrument pembayaran

PASAL 13
GANGGUAN SISTEM

Dalam hal terjadi gangguan sistem, masing-masing **PIHAK** apabila diminta oleh **PIHAK** lainnya bersedia untuk membantu dan bekerjasama dalam melakukan penelitian dan mencari solusi penyelesaian terhadap gangguan sistem tersebut.

PASAL 14
BANTUAN DATA DAN INFORMASI

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, salah satu **PIHAK** membutuhkan bantuan dari **PIHAK** lainnya berupa data-data, informasi-informasi dan keterangan-keterangan lainnya, maka masing-masing **PIHAK** setuju untuk memberikan hal-hal tersebut sepanjang data atau informasi tersebut bukan merupakan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud Pasal 15 Perjanjian ini atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 15
REKONSILIASI

(1) **PARA PIHAK** akan melaksanakan rekonsiliasi data atas setiap transaksi pembayaran melalui Platform Digital MaritimHub pada H+1 hari kerja.
(2) Dalam hal terdapat kelebihan dan/atau kekurangan atas perhitungan rekonsiliasi data transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** akan melakukan rekonsiliasi ulang dengan menggunakan data *Online Payment* **PIHAK KEDUA** sebagai acuan.
(3) Dalam hal masih terdapat kelebihan dan/atau kekurangan pemotongan atas *Settlement*, maka **PARA PIHAK** akan melakukan koreksi, pengembalian atau

penambahan dana kepada atau dari **PIHAK** lainnya dengan memperhitungkannya pada proses *Settlement* berikutnya.

PASAL 16
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban dan tanggung jawab kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 17
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

(1) Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian ini oleh salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak termasuk sebagai pelanggaran atas Perjanjian apabila hal tersebut disebabkan oleh adanya *force majeure*;

(2) Yang termasuk sebagai *force majeure* adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh **PIHAK** yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun tidak terbatas pada :
   i. Bencana alam termasuk namun tidak terbatas pada banjir, tanah longsor, gunung meletus, angin topan dan gempa bumi;
   ii. Terjangkitnya suatu wabah penyakit menular;
   iii. Pemberontakan, huru-hara, kerusuhan, perang;
   iv. Kebakaran;
   v. Sabotase;
   vi. Embargo dan pemogokan umum;
   vii. Gangguan terhadap jaringan telekomunikasi, baik terestrial maupun *ekstra-terestrial* (ruang angkasa) karena peristiwa yang terjadi di ruang angkasa termasuk tetapi tidak terbatas pada *sun-outage*, gerhana matahari, gangguan astronomi maupun meteorit.
   viii. Kebijakan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung untuk terlaksananya Perjanjian ini.

(3) **PIHAK** yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan *force majeure* tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

(4) Kelalaian atau kelambatan **PIHAK** yang terkena *force majeure* dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud Pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.

(5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat *force majeure* tidak menjadi tanggung jawab **PIHAK** lainnya.

(6) Jika peristiwa *force majeure* berkepanjangan hingga 60 (enam puluh) Hari Kalender atau lebih, maka salah satu dari **PARA PIHAK**, dengan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya dapat mengakhiri Perjanjian ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap **PIHAK** lainnya yang menyangkut pengakhiran Perjanjian ini, kecuali kewajiban pembayaran yang belum diselesaikan selama Perjanjian ini berlangsung.

PASAL 18
INFORMASI RAHASIA

(1) Informasi Rahasia berarti data-data dan informasi-informasi apapun baik bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun:
   a. untuk transaksi menggunakan Kartu Kredit *merchant* tidak diperbolehkan menyimpan data-data Kartu Kredit Pelanggan seperti: nama *card holder, expired date*, nomor kartu dan CVV.
   b. yang diberikan oleh salah satu **PIHAK** ke **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan kerjasama, baik dalam bentuk tulisan, lisan, dalam bentuk contoh, model, perangkat lunak komputer atau lainnya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian ini;
   c. yang merupakan hak kepemilikan khusus dari, mengenai atau diciptakan oleh salah satu **PIHAK**; dan
   d. mengenai salah satu **PIHAK** yang memberikan manfaat kompetisi dalam bisnis bagi **PIHAK** tersebut atau kesempatan untuk memperoleh manfaat tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan-kepentingan **PIHAK** tersebut.

(2) Informasi Rahasia tidak termasuk informasi-informasi yang:
   a. telah diterima atau berada dalam penguasaan salah satu **PIHAK** tanpa ada kewajiban untuk merahasiakan;
   b. telah menjadi dapat diketahui oleh **PIHAK** ketiga atau semua orang tanpa adanya pembatasan;
   c. telah diketahui secara umum atau menjadi tersedia bagi umum tanpa adanya pelanggaran terhadap ketentuan dari Perjanjian ini;
   d. dikembangkan sendiri oleh **PIHAK** Penerima secara independen sebagaimana dibuktikan dengan suatu bukti tertulis;
   e. jika menurut hukum harus dipaparkan, setelah terlebih dahulu diberitahukan kepada masing-masing **PIHAK** sebelum dilakukanya pemaparan informasi tersebut.

(3) Masing-masing **PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan Informasi Rahasia apapun dari **PIHAK** lainnya ke orang atau badan manapun selain daripada yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan Informasi Rahasia tersebut.

(4) Masing-masing **PIHAK** sepakat, tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya tidak akan menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan Informasi Rahasia milik **PIHAK** lainnya selain sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan tugas-tugas, peran-peran atau fungsinya dalam Perjanjian ini, dan akan melakukan semua tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan Informasi Rahasia tersebut serta menjamin untuk menyimpan asli maupun fotokopi dari dokumen-dokumen atau surat-surat dalam bentuk apapun sebagai pertinggal dan akan senantiasa menjaga kerahasiannya.

(5) **PIHAK** Penerima setuju bahwa kapapun diminta oleh **PIHAK** Pengungkap secara tertulis atau, tanpa permintaan tertulis oleh **PIHAK** Pengungkap, pada saat pengakhiran Perjanjian ini, seluruh salinan dari Informasi Rahasia yang diberikan kepada **PIHAK** Penerima oleh atau atas nama **PIHAK** Pengungkap wajib dikembalikan kepada **PIHAK** Pengungkap paling lama dalam 5 (lima) hari kerja setelah tanggal permintaan tertulis tersebut, dan seluruh catatan, studi, laporan, memorandum dan dokumen lainnya yang dipersiapkan oleh **PIHAK** Penerima atau Perwakilannya yang mengandung atau mencerminkan Informasi Rahasia wajib dihancurkan. Kendati demikian, **PIHAK** Penerima dan Perwakilannya dapat menahan salinan Informasi Rahasia sejauh dimana penahanan tersebut diwajibkan untuk menunjukkan kepatuhan terhadap hukum, aturan, peraturan atau standar profesional yang berlaku, atau sesuai dengan ketentuan kebijakan internal terkait penyimpanan rekaman-rekaman secara umum, dengan ketentuan bahwa **PIHAK** Pengungkap akan diberitahukan dan setuju untuk adanya penahanan tersebut dan bahwa setiap informasi yang ditahan akan disimpan sesuai dengan syarat-syarat dalam Perjanjian ini; dan akan, sejauh ketentuan di atas tidak berlaku untuk Informasi Rahasia yang disimpan secara elektronik, menghancurkan Informasi Rahasia yang disimpan secara elektronik tersebut hanya sejauh yang sewajarnya bisa dilakukan.

PASAL 19
KEAMANAN INFORMASI

(1) Masing-masing **PIHAK** tidak akan mengizinkan akses tidak sah atau pelanggaran keamanan atau menyebabkan kerugian atau kerusakan apa pun pada sistem atau Informasi Rahasia milik **PIHAK** lainnya berdasarkan Perjanjian ini.

(2) Masing-masing **PIHAK** harus mengambil semua tindakan keamanan fisik, teknis dan organisasi yang sesuai dan mengamati praktik industri yang baik untuk menyediakan Layanan sedemikian rupa untuk menjaga keamanan dan integritas data (termasuk Data Pribadi) dan mencegah korupsi, perusakan, kerusakan, atau kehilangan data tersebut.

(3) Jika terjadi pelanggaran data, **PIHAK** yang melanggar akan membantu **PIHAK** lainnya dalam melakukan investigasi dan analisis apa pun yang mungkin diperlukan. **PIHAK** yang melanggar harus mengambil semua langkah yang diperlukan sesuai dengan praktik industri yang baik, dengan mempertimbangkan tingkat keparahan risiko, untuk menyelesaikan pelanggaran data tersebut secepat mungkin dan untuk mencegah terulangnya kembali.

(4) Jika terjadi akses tidak sah atau pelanggaran keamanan, **PIHAK** harus segera, dan dalam hal apa pun, selambat-lambatnya 2 hari kerja sejak tanggal mengidentifikasi atau mempelajari Pelanggaran Keamanan dalam sistem keamanannya, memberi tahu **PIHAK** lainnya tentang pelanggaran tersebut. **PIHAK** yang mengalami akses tidak sah atau pelanggaran keamanan harus segera setelah mengidentifikasi atau mempelajari Pelanggaran Keamanan dalam sistem keamanannya, mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk meminimalkan dan mengurangi kerugian yang mungkin dialami oleh **PIHAK** lainnya.

(5) Masing-masing **PIHAK** dapat menyimpan log transaksi di platformnya dengan cara yang aman seperti yang dipersyaratkan berdasarkan Hukum yang berlaku, untuk catatan internal perusahaannya maupun untuk audit otoritas pengatur apa pun.

PASAL 20
PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI, TRANSFER DATA DAN PELINDUNGAN DATA PRIBADI

(1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, salah satu **PIHAK** membutuhkan dari **PIHAK** lainnya penyediaan data-data termasuk Data Pribadi Pengguna, informasi-informasi dan keterangan-keterangan lainnya, maka masing-masing **PIHAK** setuju untuk memberikan hal-hal tersebut sepanjang data atau informasi tersebut hanya digunakan untuk pelaksanaan Perjanjian ini dan tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.

(2) Terhadap data yang disebut pada Pasal ini yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya berlaku ketentuan Pasal 17 Perjanjian ini.

(3) Masing-masing **PIHAK** mengakui bahwa **PIHAK** nya untuk tujuannya masing-masing akan memproses data pribadi sebagai Pengendali data pribadi (sebagaimana berlaku) berdasarkan Perjanjian ini. Dengan demikian, masing-masing **PIHAK** menyanggupi untuk mematuhi semua ketentuan terkait dalam Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, peraturan perundang-undangan pelaksanaannya, dan semua undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya yang sekarang atau di masa mendatang akan diundangkan terkait terhadap pelindungan data pribadi ("Undang-Undang Pelindungan Data") yang berhubungan dengan pemrosesan data pribadi yang akan dilakukannya dan sesuai dengan peran yang diambilnya berdasarkan Perjanjian ini.

(4) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini diperlukan adanya transfer Data Pribadi, maka **PARA PIHAK** memahami dan menyepakati proses transfer Data Pribadi dilakukan sesuai dengan ketentuan transfer Data Pribadi yang diatur pada Undang-Undang Pelindungan Data.

(5) Dalam hal terdapat Data Pribadi dalam Kerjasama ini, **PARA PIHAK** Wajib memastikan Data Pribadi yang di proses **PARA PIHAK** sudah berdasarkan persetujuan dari subjek Data Pribadi.

(6) Dalam rangka menjalankan kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini yang memposisikan **PIHAK KEDUA** sebagai pemroses data, **PIHAK KESATU** memberikan persetujuan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pemrosesan data pribadi termasuk namun tidak terbatas kepada pengumpulan, penggunaan, penyimpanan, pengiriman dan pemrosesan data pribadi termasuk kepada pengolahan data terkait dengan kegiatan usaha **PIHAK KEDUA.**

(7) Atas kegagalan pelindungan Data Pribadi yang dilakukan oleh salah satu **PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka secara masing-masing **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala risiko dari kegagalan pelindungan Data Pribadi tersebut termasuk segala bentuk sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Pelindungan Data dan gugatan ganti rugi dari Subjek Data Pribadi.

PASAL 21
PENANGANAN FRAUD DAN/ATAU PENCUCIAN UANG

Dalam hal terjadinya indikasi fraud dan/ atau pencucian uang, maka **PARA PIHAK** wajib melakukan usaha terbaiknya dalam melakukan penyelesaian, dengan proses penanganannya dilakukan termasuk dan tidak terbatas pada langkah-langkah sebagai berikut :

1. Setiap **PIHAK** berhak menghentikan layanan sementara dan/ atau tindakan lainnya secara sewaktu-waktu dan memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya.
2. **PARA PIHAK** wajib untuk melakukan investigasi lanjutan yang dilaksanakan dengan itikad baik dengan tetap mematuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Hasil investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini bersifat final dan mengikat **PARA PIHAK** serta dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK.**
4. Setiap **PIHAK** membebaskan **PIHAK** lainnya ("**PIHAK** Tidak Terdampak") dari tuntutan dan/ atau kewajiban melakukan penggantian kerugian atas kesalahan sistem dan/atau kondisi lain yang terjadi pada ekosistem dan/ atau sistem milik **PIHAK** tersebut ("**PIHAK** Terdampak") yang menimbulkan kerugian, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian yang disebabkan oleh *fraudster* atau **PIHAK** ketiga lain, selama tidak dapat dibuktikan bahwa kondisi yang menyebabkan **PIHAK** Terdampak mengalami kerugian adalah kesalahan atau dilakukan dan/atau kelalaian dari **PIHAK** Tidak Terdampak.

PASAL 22
AUDIT

PARA PIHAK menjamin dan bersedia untuk memberikan hak akses audit terhadap otoritas yang berwenang (Bank Indonesia dan/ atau auditor eksternal yang ditunjuk oleh instansi pemerintah), serta menerima informasi untuk keperluan pemeriksaan, termasuk hak akses, baik secara *logic* maupun *physical* terhadap data yang dikelola oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dengan memperhatikan ketentuan/ peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan atas audit yang akan dilakukan, maka **PIHAK** yang hendak dimintakan data/keterangan akan menerima pemberitahuan tertulis sebelumnya.

PASAL 23
LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

(1) **PARA PIHAK** atau karyawan/ perwakilannya atau agen, dan/ atau **PIHAK** affiliasinya tidak diperkenankan mengikatkan atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi kepada karyawan/perwakilannya atau agen dan/atau **PIHAK** afiliasi dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(2) Setiap **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian ini, baik seluruhnya maupun sebagian, apabila **PIHAK** tersebut berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa **PIHAK**

lainnya, karyawan/ perwakilan atau agen atau **PIHAK** afiliasi dari **PIHAK** lainnya, telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini kepada karyawan/perwakilan atau agen atau **PIHAK** afiliasi dari **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri Perjanjian ini.

(3) Masing-masing **PIHAK** atau pegawai dari masing-masing **PIHAK** dilarang menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberi uang, properti, hadiah, komisi, rabat, janji untuk memberi atau bentuk-bentuk lainnya yang bernilai kepada pegawai **PIHAK** lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.

(4) Masing-masing **PIHAK** sepakat akan mematuhi semua undang-undang dan peraturan anti-penyuapan atau peraturan perundang-undangan lainnya terkait dengan pelaksanaan Perjanjian ini, terlepas dari fakta bahwa undang-undang dan peraturan anti-penyuapan tersebut mungkin tidak berlaku pada masing-masing **PIHAK**.

(5) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh masing-masing **PIHAK** atau pegawainya atau orang yang bekerja untuknya dapat mengakibatkan diakhirinya Perjanjian ini oleh **PIHAK** lainnya. Segala akibat yang timbul sehubungan dengan pelanggaran terhadap Pasal ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan pelanggaran tersebut.

PASAL 24
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

(1) Tidak ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dapat ditafsirkan sebagai pengalihan atau dengan cara apapun melepas kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lain;

(2) Merek dagang atau merek masing-masing **PIHAK** tidak akan digunakan tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

(3) Setiap dan segala Hak Kekayaan Intelektual dan/atau *goodwill* untuk segala tujuan yang timbul di mana pun dan bagaimanapun, yang melekat pada, merupakan turunan dari atau yang terhubung kepada Hak Kekayaan Intelektual atau melekat pada, merupakan turunan dari, yang terhubung pada atau dihasilkan dari penggunaan Hak Kekayaan tersebut sehubungan dengan Perjanjian ini harus, dalam setiap penggunaan, menjadi milik terus menerus dari pemilik Hak Kekayaan Intelektual tersebut kecuali diatur lain oleh peraturan perundang- undangan Oleh karenanya:
   a. tidak ada **PIHAK** manapun yang dapat mengklaim hak, titel, atau kepentingan dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual dan/atau *goodwill*; dan
   b. dimana Hak Kekayaan Intelektual dan/atau *goodwill* sudah dimiliki oleh salah satu **PIHAK**, maka akan terus dimiliki oleh **PIHAK** tersebut.

(4) **PARA PIHAK** dengan ini mengetahui bahwa Hak Kekayaan Intelektual pada setiap informasi yang diterima oleh setiap **PIHAK** dan produk dan/atau layanan yang berkaitan dengan informasi tersebut dan akan tetap dimiliki oleh **PIHAK** yang mengungkapkan.

(5) Masing-masing **PIHAK** berhak untuk menggunakan nama dan merek dagang **PIHAK** lain dalam promosinya, dan masing-masing **PIHAK** mengibahkan lisensi non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, tidak dapat dialihkan dan ijin

penggunaan terbatas lainnya kepada **PIHAK** lainnya untuk menggunakan nama dan merek dagang untuk tujuan tersebut dalam media apapun diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan tertulis yang wajar kepada **PIHAK** lain terlebih dahulu.

(6) **PARA PIHAK** wajib untuk berupaya sewajarnya untuk memastikan bahwa atribut yang sesuai kepemilikan termasuk dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

(7) Masing-masing **PIHAK** wajib mengganti kerugian (dan tetap membebaskan) dan tidak merugikan **PIHAK** lain dan afiliasinya, petugas, direktur, karyawan dan pemegang saham terhadap setiap biaya, klaim, tuntutan, biaya (termasuk biaya hukum yang wajar dan biaya penyelidikan (jika ada), kerugian, kewajiban dan tindakan dalam setiap hal baik langsung atau tidak langsung yang timbul dari setiap klaim **PIHAK** ketiga untuk salah satu dari hal tersebut dalam kaitannya dengan Hak Kekayaan Intelektual.

(8) **PARA PIHAK** tidak diwajibkan mempertahankan Hak Kekayaan Intelektual **PIHAK** lainnya.

PASAL 25
PEMBERITAHUAN

(1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat di antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada **PIHAK** yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis.

(2) Pemberitahuan dan surat menyurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU:
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
Jalan Medan Merdeka Barat No. 8
Jakarta 10110
Telepon : 021 – 381 3269
Email : djpl@dephub.go.id
Up. : Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

PIHAK KEDUA:
PT FINNET INDONESIA
Telkom Landmark Tower, Lantai 28
Jalan Jend. Gatot Subroto Kavling 52
Jakarta 12710
Telepon : 021 - 829 9999
Email : finpay.government@finnet.co.id
Up. : VP Government & Public Services

(3) Masing-masing **PIHAK** wajib segera memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya apabila ada perubahan alamat, nomor telepon dan faksimili melalui pos tercatat, faksimili atau telepon. Perubahan alamat akan mulai berlaku 7 (tujuh) Hari Kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Segala resiko yang timbul akibat dari perpindahan alamat yang tidak diberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang pindah alamat tersebut.

PASAL 26
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) **PARA PIHAK** memahami dan setuju bahwa Perjanjian ini tunduk kepada hukum Indonesia dan akan diterapkan untuk menafsirkan Perjanjian ini. Setiap tindakan yang diajukan untuk menyelesaikan perselisihan antara **PARA PIHAK** harus dibawa ke Indonesia.

(2) Semua dan tiap-tiap perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

(3) Apabila **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender secara musyawarah untuk mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan semua sengketa yang timbul dari Perjanjian ini kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) untuk diselesaikan pada tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan dan prosedur BANI. Selama perselisihan dalam proses penyelesaian BANI, maka **PARA PIHAK** tetap melaksanakan kewajiban-kewajibannya menurut Perjanjian ini.

PASAL 27
ADENDUM

Setiap penambahan atau perubahan terhadap ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam adendum, serta akan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 28
KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu **PIHAK** ke **PIHAK** ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya. Setiap usaha salah satu **PIHAK** untuk mengalihkan suatu hak, tugas, dan kewajibannya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini tanpa persetujuan dari **PIHAK** lainnya secara tertulis adalah tidak sah dan Salah Satu **PIHAK** yang dirugikan berhak untuk mengajukan Penghentian Kerjasama.

(2) Perjanjian ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik dan menjunjung prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

(3) Dalam hal terdapat hal-hal yang belum cukup diatur atau belum cukup jelas diatur dan/ atau diperlukan perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini mengenai peraturan dari Bank Indonesia (BI), menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** dan sepakat untuk tunduk dan patuh pada peraturan dari Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

(4) Masing-masing **PIHAK** yang terkait dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib tunduk dan mematuhi peraturan pengenai regulasi tentang Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) beserta peraturan turunannya sesuai dengan kapasitas, ruang lingkup, cakupan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini.

(5) Dalam hal terjadi pertentangan antara Lampiran Perjanjian dengan batang tubuh Perjanjian ini, maka yang berlaku adalah batang tubuh Perjanjian ini.

(6) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi **PIHAK-PIHAK** yang menandatangani, penggantinya dan mereka yang memperoleh keuntungan dari padanya.

(7) Apabila suatu ketentuan Perjanjian ini atau bagian dari padanya dianggap batal, tidak sah atau tidak dapat diberlakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap mana ketentuan ini tunduk, maka ketentuan dimaksud dianggap batal, tidak sah dan tidak dapat diberlakukan dengan cara apapun, namun ketidakberlakuan tersebut tidak akan mempengaruhi setiap ketentuan lain dari Perjanjian ini, dimana ketentuan lainnya tersebut akan tetap berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat.

(8) Kelalaian atau keterlambatan salah satu **PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini tidak berlaku sebagai pembebasan atau pengesampingan dari setiap pelaksanaan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini dan tidak mencegah pelaksanaan selanjutnya dari hak dan kewajiban tersebut.

(9) Apabila terdapat penambahan Platform Digital /*website/platform* yang akan menggunakan layanan *Payment Gateway*, maka **PIHAK KESATU** akan memberitahukan melalui Surat Resmi kepada **PIHAK KEDUA** dan kesepakatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan yang bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
MUHAMMAD MASYHUD	**RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN**

LAMPIRAN II
POLA *SETTLEMENT*

1. *Settlement Amount* sesuai dengan data transaksi dengan cara **PIHAK KEDUA** mentransfer dari nomor rekening atas nama **PT Finnet Indonesia** ke Kas Negara berdasarkan Laporan Hasil Rekonsiliasi.

2. Apabila **PIHAK KEDUA** terbukti melakukan kelalaian atau kesengajaan sehingga mengakibatkan keterlambatan *Settlement* sebagaimana dimaksud butir 1 Lampiran ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib membayar denda keterlambatan kepada Kas Negara berdasarkan peraturan yang berlaku.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
MUHAMMAD MASYHUD	**RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN**

BAGIAN II

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN I
STANDAR LAYANAN (*SERVICE LEVEL*)

***Service Level* PIHAK KEDUA**

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa ketersediaan (*availability*) Instrumen pembayaran sebesar 99% (sembilan puluh sembilan persen);
2. *Respon Time* terhadap gangguan dengan rentang waktu maksimum 15 menit;
3. *Mean Time To Repair* (waktu perbaikan gangguan) adalah selama-lamanya 6 (enam jam)*.

Keterangan : *) Kondisi disesuaikan dengan lokasi operasional layanan.

Formula Restitusi :

Apabila terjadi putus layanan akibat kesalahan sistem di sisi **PIHAK KEDUA** selama lebih dari 36 (tiga puluh enam) jam secara akumulatif dalam jangka waktu 1 (satu) bulan, yang mengakibatkan sistem di sisi **PIHAK KEDUA** tidak dapat berjalan dengan baik, maka atas tidak berfungsinya sistem tersebut **PIHAK KEDUA** harus membayar denda sebesar:

Total lama gangguan kumulatif dalam satu bulan dikurangi lama gangguan yang ditoleransi dalam satu bulan, dikalikan jumlah *Fee* transaksi untuk bulan berjalan yang menjadi hak **PIHAK KEDUA** dibagi dengan jumlah jam dalam satu bulan. Dengan rumusan sebagai berikut:

Besar kompensasi =

$$\frac{(a - b) \times \text{jumlah } \textit{Fee} \text{ transaksi untuk bulan berjalan yang menjadi hak PIHAK KEDUA}}{T}$$

Keterangan :

a : Total lama gangguan dalam satu bulan (jam)

b : Lama gangguan yang ditoleransi 36 jam

T : Jumlah jam dalam satu bulan (720 jam)

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
MUHAMMAD MASYHUD	RAKHMAD TUNGGAL AFIFUDDIN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO.8
JAKARTA 10110

TELP: +62 813-6001- 3838

WEBSITE : djka.kemenhub.go.id
EMAIL : ditjenka@kemenhub.go.id

Nomor : KA.403/1/1/DJKA/2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan PT Jasa Raharja tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Perkeretaapian

Jakarta, 18 Mei 2026

Yth. Direktur Utama PT Jasa Raharja

Sehubungan telah dilaksanakannya penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan dengan PT Jasa Raharja tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Perkeretaapian Nomor HK.201/1/5/DJKA/2026 dan Nomor P/12/SP/2026 tanggal 2 April 2026 oleh Para Pihak, bersama ini terlampir disampaikan dokumen asli naskah Kesepakatan Besama dimaksud untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal Perkeretaapian,

Allan Tandiono
NIP 198801182025211023

Tembusan:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
2. Direktur Keselamatan Perkeretaapian.

JASA RAHARJA
A member of IFG

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DENGAN
PT JASA RAHARJA

TENTANG

KERJA SAMA PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PENINGKATAN PELAYANAN DAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

Nomor : HK.201/1/5/DJKA/2026
Nomor : P/12/SP/2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan April tahun dua ribu dua puluh enam (02 - 04 - 2026) di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini:

I. **ALLAN TANDIONO**, selaku Direktur Jenderal Perkeretaapian berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 74/TPA TAHUN 2025 tanggal 6 mei 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dan oleh karenanya demikian sah bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perkeretaapian - Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8 Jakarta Pusat 10110, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

II. **DEWI ARYANI SUZANA,** selaku Direktur Hubungan Kelembagaan PT Jasa Raharja yang diangkat berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja Nomor 111 Tahun 2025 dan Nomor 9/KepSir-PS/BPUI/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Asuransi Kerugian Jasa Raharja, dalam hal ini bertindak selaku Plt. Direktur Utama PT Jasa Raharja, yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Direksi tanggal 5 Januari 2026, dan oleh karenanya demikian sah bertindak untuk dan atas nama PT Jasa Raharja, yang berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav C-2, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK,** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Instansi yang memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perkeretaapian berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan;

b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah badan usaha yang menyelenggarakan program jaminan perlindungan dasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan beserta peraturan pelaksanaannya;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi bidang keselamatan antara **PARA PIHAK** untuk peningkatan pelayanan dan keselamatan perkeretaapian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama guna meningkatkan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Peningkatan Pelayanan dan Keselamatan Perkeretaapian yang selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama", dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR HUKUM

Dasar hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965 tentang Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 209 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5961);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77);

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
11. Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 369);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Tata Cara Tetap Pelaksanaan Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan, Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1151); dan
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 115).

PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam kerja sama Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Untuk peningkatan pelayanan dan keselamatan perkeretaapian.

(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini untuk meningkatkan sinergi **PARA PIHAK** guna mewujudkan peningkatan keselamatan serta menciptakan transportasi kereta api yang aman, nyaman, selamat dan terintegrasi.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah meliputi:

a. Dukungan Analisis Kebijakan dan Ketentuan yang mendukung jaminan pelayanan dan keselamatan perkeretaapian;
b. Berbagi pakai data dan/atau informasi;
c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
d. Pemanfaatan sarana dan prasarana;
e. Penyelenggaraan program keselamatan perkeretaapian;
f. Sosialisasi, Monitoring, dan Evaluasi; dan
g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK.**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. **PARA PIHAK** menyiapkan sarana, prasarana, personel dan fasilitas pendukung lainnya dalam rangka peningkatan keselamatan;
b. **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam penyelenggaraan keselamatan transportasi perkeretaapian dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan; dan
c. **PARA PIHAK** dapat secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 5
PELAKSANAAN

(1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan membuat Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang mengatur antara lain lingkup kerja sama, mekanisme, atau tata cara kerja sama, serta hak dan kewajiban **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan yang dalam hal ini diwakili oleh Pejabat yang berwenang atau yang ditunjuk sesuai bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
DUKUNGAN ANALISIS KEBIJAKAN DAN KETENTUAN YANG MENDUKUNG JAMINAN PELAYANAN DAN KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

PARA PIHAK sepakat bekerja sama dalam dukungan analisis kebijakan dan ketentuan yang mendukung jaminan pelayanan dan keselamatan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang **PARA PIHAK.**

PASAL 7
BERBAGI PAKAI DATA DAN/ATAU INFORMASI

(1) **PARA PIHAK** saling melaksanakan berbagi pakai data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, yang disampaikan secara

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

tertulis melalui media elektronik atau non elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kelengkapan data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

PARA PIHAK sepakat bekerja sama dibidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, seminar, lokakarya, penyuluhan, diskusi kelompok terpumpun, serta kegiatan lain yang disepakati.

PASAL 9

PEMANFAATAN SARANA DAN PRASARANA

(1) **PARA PIHAK** dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara proporsional.

(2) Pemanfaatan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

PENYELENGGARAAN PROGRAM KESELAMATAN PERKERETAAPIAN

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam penyelenggaraan program keselamatan perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dalam rangka mencegah dan mengurangi risiko kecelakaan serta melindungi keselamatan pengguna perkeretaapian.

(2) Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsi masing **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 11
SOSIALISASI, MONITORING, DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat bekerja sama dalam melakukan sosialisasi, monitoring, dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi peningkatan pelayanan dan keselamatan perkeretaapian.

(2) Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsi masing **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran berdasarkan kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing **PIHAK**, dan/atau sumber-sumber pendanaan sah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 13
MASA BERLAKU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas persetujuan berdasarkan evaluasi **PARA PIHAK** dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.

(3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 14
ANTI PENYUAPAN, KORUPSI, DAN APU-PPT

(1) **PARA PIHAK** sepakat dan menjamin bahwa pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan bahwa seluruh proses dan kegiatan ini bebas dari praktik penyuapan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan/atau perbuatan pelanggaran hukum lainnya. Selain hal itu, **PARA PIHAK** juga menjamin akan senantiasa menghindari adanya konflik kepentingan yang dapat merugikan salah satu **PIHAK**.

(2) Apabila salah satu **PIHAK** terbukti melanggar ketentuan Pasal ini, maka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diakhiri dan **PIHAK** yang melanggar bertanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 15
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

(1) **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi, baik secara bersama-sama maupun masing-masing **PIHAK** terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan perbaikan sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK** dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai pertimbangan bagi **PARA PIHAK** untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama.

PASAL 16
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) adalah kejadian yang dapat memengaruhi jalannya pelaksanaan kewajiban berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dan/atau, keadaan mana berada di luar kemampuan masing-masing **PARA PIHAK** (yang relevan) untuk mencegahnya yang mengakibatkan salah satu atau **PARA PIHAK** (yang relevan) tidak dapat melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Kesepakatan Bersama ini.

(2) Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kejadian sebagai berikut:

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana Kesepakatan Bersama ini;

b. Akibat manusia, seperti perang, invansi bersenjata, revolusi, reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, gangguan sipil, serangan atau sebab serupa lainnya, termasuk terjadinya demonstrasi, pergolakan massa, pemogokan dan/atau pemboikotan tanpa memandang bagaimana dan dimana terjadinya, invasi atau infiltrasi musuh, terorisme atau sabotase, serangan siber (*cyber attack*) keadaan perang baik pemerintah terlibat secara langsung (fisik) maupun tidak terlibat secara langsung dengan negara lain, perang saudara atau pemberontakan terhadap pemerintah, tindakan tidak bersahabat yang dilakukan oleh suatu kekuasaan negara asing yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melakukan sebagian atau seluruh kewajiban sebagaimana dimaksud pada Kesepakatan Bersama ini; dan

c. Sebab-sebab lain seperti keputusan atau peraturan pemerintah Indonesia yang mempengaruhi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud Kesepakatan Bersama ini.

(3) Apabila terjadi Keadaan Memaksa (*Force Majeure*), maka **PIHAK** yang terkena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) harus memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak terjadinya Keadaan Memaksa (*Force Majeure).*

(4) Apabila dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan tersebut tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan maka adanya Keadaan Memaksa *(Force Majeure*) tersebut dianggap telah disetujui.

(5) Apabila Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) disetujui, maka Kesepakatan Bersama ini ditinjau kembali oleh **PARA PIHAK**, sedangkan apabila Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) ditolak, maka penyelesaian hak dan kewajiban berlaku ketentuan sebagaimana ditentukan Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

PASAL 17
KORESPONDENSI

(1) Untuk melakukan koordinasi dan korespondensi, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menunjuk pihak-pihak selaku penanggung jawab Kesepakatan Bersama ini.

(2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**
Direktorat Jenderal Perkeretaapian
u.p. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta Pusat 10110
Email : ditjenka@kemenhub.go.id
No. Telepon : 081360013838

b. **PIHAK KEDUA**
PT Jasa Raharja
U.p. Divisi Asuransi
Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. C-2, Jakarta Selatan 12920
Email : asuransi@jasaraharja.co.id
No. Telepon : 021-5203454

PASAL 18
ADENDUM

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam Kesepakatan Bersama ini dan/atau apabila Kesepakatan Bersama ini akan diubah atau diperpanjang, akan dituangkan secara tertulis dalam Adendum, yang selanjutnya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Adendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani pada tempat, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
SA RAHARJA DIREKSI	
DEWI ARYANI SUZANA	**ALLAN TANDIONO**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan itikad baik dan ditandatangani pada tempat, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing untuk **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK PERTAMA,**
DEWI ARYANI SUZANA	**ALLAN TANDIONO**

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : HK.201/1/8/STJ/2026

Jakarta, 30 Maret 2026

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 1 (Satu) Berkas

Hal : Penyampaian Nota Kesepahaman antara Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Nota Kesepahaman antara Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada Infrastruktur Publik, bersama ini terlampir disampaikan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud yang telah ditandatangani pada hari Kamis, 27 November 2025 dengan Nomor: 19/NKB/M.UMKM/2025, Nomor: 22/PKS/M/2025, Nomor: PJ-MHB 13 Tahun 2025, Nomor: 100.4.7/9525/SJ dan Nomor: MoU-01/BPU/11/2025 untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Nota Kesepahaman dimaksud dapat pula diunduh melalui Metadata Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perhubungan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

F. Budi Prayitno
NIP 1968402 199403 1 002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Dirjen di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Lampiran Surat Kepala Biro Hukum
Nomor : HK.201/1/8/STJ/2026
Tanggal : 30 Maret 2026

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Intergrasi Transportasi dan Multimoda;
7. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan; dan
8. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi.

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

KEMENTERIAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

DAN

BADAN PENGATURAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PENYEDIAAN DAN PEMANFAATAN TEMPAT PROMOSI DAN PENGEMBANGAN USAHA BAGI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH PADA INFRASTRUKTUR PUBLIK

NOMOR: 19/NKB/M.UMKM/2025

NOMOR: 22/PKS/M/2025

NOMOR: PJ-MHB 13 Tahun 2025

NOMOR: 100.4.7.1/9525/SJ

NOMOR: MoU-01/BPU/11/2025

Pada hari ini Kamis, tanggal dua puluh tujuh, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (27-11-2025) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **MAMAN ABDURRAHMAN** : Selaku Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Gatot Subroto No. Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. **DODY HANGGODO** : Selaku Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;
3. **DUDY PURWAGANDHI** : Selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA;
4. **MUHAMMAD TITO KARNAVIAN** : Selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT;
5. **DONY OSKARIA** : Selaku Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Selatan Nomor 13, Gambir, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT DAN PIHAK KELIMA untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan

secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. Berdasarkan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK sepakat untuk menyusun, menandatangani, dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Pada Infrastruktur Publik, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk mendukung implementasi regulasi terkait penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pada infrastruktur publik, sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

(2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mendukung pemanfaatan ruang komersial pada infrastruktur publik untuk tempat promosi dan pengembangan usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah sehingga berdaya saing dan naik kelas.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

(1) Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:
   a. koordinasi dan sinergi tugas dan fungsi PARA PIHAK;
   b. pertukaran data dan informasi;
   c. pemberdayaan dan pembinaan usaha mikro, kecil, dan menengah;
   d. sosialisasi dan pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan/atau
   e. kegiatan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendukung program/kegiatan penyediaan dan pemanfaatan tempat promosi dan pengembangan usaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah pada infrastruktur publik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk di lingkungan PARA PIHAK dan/atau sesuai dengan tugas fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara terkait, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

(1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini atau sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

(3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi dan/atau berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran Nota Kesepahaman tersebut tidak akan mempengaruhi penyelesaian pelaksanaan Nota Kesepahaman yang telah dilaksanakan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6

ADENDUM

(1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini, ditetapkan dalam bentuk adendum yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 8

KERAHASIAAN

(1) Setiap informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini bersifat terbuka dan dapat diakses oleh publik, kecuali ditentukan bersifat rahasia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.

(3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 10

KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pejabat yang ditunjuk	: Asisten Deputi Kemitraan, Rantai Pasok dan Pemasaran Usaha Kecil
Kedudukan	: Jl. Gatot Subroto No.Kav. 94, Pancoran, Jakarta Selatan
Surel	: mitrapasok.uk@umkm.go.id

b. PIHAK KEDUA

Pejabat yang ditunjuk	: Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol
Kedudukan	: Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Surel	: bpjt.umum@pu.go.id

c. PIHAK KETIGA

Pejabat yang ditunjuk	: Kepala Biro Hukum
Kedudukan	: Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta, 10110
Surel	: birohukum@kemenhub.go.id

d. PIHAK KEEMPAT

Pejabat yang ditunjuk	: Kepala Pusat Fasilitasi Kerja Sama
Kedudukan	: Jl. Medan Merdeka Utara, No.7, Jakarta Pusat, 10110

Surel : fasker-setjen@kemendagri.go.id

e. PIHAK KELIMA

Pejabat yang ditunjuk : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi Dukungan Strategis

Kedudukan : Jalan Medan Merdeka Selatan No. 13 Jakarta Pusat 10110

Surel : bag.humas@bumn.go.id

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.

(3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 11

PENUTUP

(1) Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman dalam 5 (lima) rangkap asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan masing-masing 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PARA PIHAK.

(2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU,

MAMAN ABDURRAHMAN

PIHAK KEDUA,

DODY HANGGODO

PIHAK KETIGA,

DUDY PURWAGANDHI

PIHAK KEEMPAT,

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

PIHAK KELIMA,

DONY OSKARIA

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
SEKRETARIAT JENDERAL

JL. MEDAN MERDEKA BARAT NO. 8
JAKARTA 10110

TELP. : (021) 3811308, 3505006
FAX. : (021) 3522338
SMS center : +62.813-111111-05

TLX : 46116 Menhub IA
email : pusdatin@dephub.go.id
home page : www.dephub.go.id

Nomor : HK.201/1/6/STJ/2026 Jakarta, 9 Februari 2026
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Kesepahaman Bersama antara Kementerian Transmigrasi dengan Kementerian Perhubungan tentang Sinergisitas Bidang Transmigrasi dan Bidang Perhubungan

Yth. (Daftar Terlampir)

Sehubungan dengan telah ditandatanganinya Kesepahaman Bersama antara Kementerian Transmigrasi dengan Kementerian Perhubungan tentang Sinergisitas Bidang Transmigrasi dan Bidang Perhubungan, bersama ini terlampir disampaikan Kesepahaman Bersama sebagaimana dimaksud yang telah ditandatangani pada hari Selasa, 18 November 2025 dengan Nomor: 53/HKM.07.01/XI/2025 dan Nomor: PJ-MHB 11 Tahun 2025 untuk dapat dipergunakan dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Kesepahaman Bersama dimaksud dapat pula diunduh melalui Metadata Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perhubungan.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL

F. Budi Prayitno
NIP 1968402 199403 1 002

Tembusan:
1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Para Dirjen di lingkungan Kementerian Perhubungan;
4. Para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan.

Lampiran Surat Kepala Biro Hukum
Nomor : HK.201/1/6/STJ/2026
Tanggal : 9 Februari 2026

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkeretaapian;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Intergrasi Transportasi dan Multimoda;
7. Sekretaris Badan Pengembangan SDM Perhubungan; dan
8. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi.

KESEPAHAMAN BERSAMA

ANTARA

KEMENTERIAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

DAN

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

SINERGISITAS BIDANG TRANSMIGRASI DAN BIDANG TRANSPORTASI

NOMOR : 53/HKM.07.01/XI/2025
NOMOR : PJ-MHB 11 Tahun 2025

Pada hari ini Selasa, tanggal delapan belas, bulan November, tahun dua ribu dua puluh lima (18-11-2025), bertempat di kedudukan masing-masing, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA : Selaku Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Transmigrasi, yang berkedudukan di Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. DUDY PURWAGANDHI : Selaku Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024 tanggal 20 Oktober 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan, yang berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transmigrasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara; dan
b. PIHAK KEDUA merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Sinergisitas Bidang Transmigrasi dan Bidang Transportasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja sama di antara PARA PIHAK dengan menyinergikan tugas dan fungsi PARA PIHAK dalam bidang transmigrasi dan bidang transportasi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan informasi;
b. penyelenggaraan analisis dan pemberian rekomendasi kebijakan di bidang transportasi pada kawasan transmigrasi;
c. sinergi perencanaan, pembangunan dan/atau pengembangan infrastruktur transportasi yang mendukung konektivitas dan integrasi di kawasan transmigrasi;
d. dukungan pemanfaatan sarana dan/atau prasarana oleh PARA PIHAK;
e. kolaborasi kegiatan dalam mendukung upaya keselamatan, keamanan dan mitigasi bencana transportasi;
f. peningkatan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia sesuai tugas dan fungsi PARA PIHAK; dan
g. kerja sama lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama dan/atau bentuk lainnya yang dibuat dan ditindaklanjuti oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing PIHAK sesuai tugas dan fungsinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. mengutamakan kelancaran tugas pokok PARA PIHAK; dan
b. menjaga kerahasiaan PARA PIHAK dan tidak menyebarkan hasil kerja sama yang bersifat rahasia.

PASAL 5
PENDANAAN

Pendanaan yang timbul sebagai akibat dari Kesepahaman Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing dan/atau dari sumber lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

(1) Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
(2) Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diperpanjang atau diakhirinya Kesepahaman Bersama ini.
(3) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila terjadi perubahan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepahaman Bersama ini.
(4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terhadap pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Kesepahaman Bersama ini sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, PARA PIHAK menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Penanggung jawab	:	Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal Kementerian Transmigrasi
Alamat	:	Kementerian Transmigrasi, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan 12750
Telepon	:	(021) 7971972
e-mail	:	humas@transmigrasi.go.id

PIHAK KEDUA

Penanggung jawab	:	Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Perhubungan
Alamat	:	Kementerian Perhubungan, Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 8, Gambir Jakarta Pusat 10110
Telepon	:	-
e-mail	:	birohukum@kemenhub.go.id

(2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepahaman Bersama ini.

(3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 9
ADENDUM

Setiap perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
DUDY PURWAGANDHI	M. IFTITAH SULAIMAN SURYANAGARA